

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Pengertian	ix
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4. Sistematika Penulisan	
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
3.4. Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5. Penentuan Isu Strategis	
Bab IV Tujuan dan Sasaran	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	
5.1. Strategi	
5.2. Arah Kebijakan	
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
Bab VII Penutup	

DAFTAR TABEL

Tabel

DAFTAR GAMBAR

Gambar	
--------	-------

KATA PENGANTAR

Dalam beberapa tahun terakhir ini permasalahan lingkungan hidup semakin kompleks sehingga upaya pengelolaan lingkungan memerlukan perencanaan yang terarah dan terukur. Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan strategis yang memenuhi kriteria dalam menunjang manajemen untuk pengambilan keputusan.

Dengan berakhirnya masa RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 maka perlu disusun RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan mengacu kepada RPJMN Republik Indonesia 2014-2019 dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003-2025. Selanjutnya masing-masing Perangkat Daerah (PD) harus melakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2017-2022 berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang pengendalian dampak lingkungan, berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Renstra yang akan dipergunakan sebagai salah satu pedoman dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsi DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Semoga apa yang tertuang dalam Revisi Renstra ini dapat diwujudkan, demi peningkatan kualitas lingkungan hidup di Bumi Serumpun Sebalai sehingga lingkungan hidup lestari dapat dititipkan bagi generasi yang akan datang dan menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Pangkalpinang, Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung,

CEPPY NUGRAHA

Pembina Utama Madya
NIP. 19700409 199603 1 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 berisi instrumen untuk rumusan dalam pencapaian tujuan organisasi pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas kepada pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mana rumusan permasalahan lingkungan hidup tersebut diperoleh dari aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor lingkungan hidup, serta mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 adalah jawaban konkrit terhadap terciptanya kualitas lingkungan hidup pada level yang

memenuhi standar baku mutu lingkungan dan juga merupakan harapan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, pemantauan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup yang berasaskan pelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan adanya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dapat dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah serta tepat sasaran agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Secara Internal fungsi renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan adalah sebagai dokumen acuan untuk mempermudah melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, renstra juga berperan sebagai pedoman untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, serta sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Selain berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022, penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup mengacu kepada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 serta tetap memperhatikan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu unsur penunjang

pembangunan bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang pengendalian dampak lingkungan, terbentuk melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2001 tanggal 28 Agustus 2001 kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002 dan Perda Nomor 7 Tahun 2008. Dan terakhir dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka Badan Lingkungan Hidup Daerah berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017 – 2022
2. Sebagai dokumen perencanaan untuk memberikan arah pembangunan daerah sektor lingkungan hidup dalam jangka waktu lima tahun ke depan;
3. Memberikan arah sekaligus sebagai dasar acuan bagi seluruh komponen Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan organisasi
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun mendatang;

Adapun tujuan dari tersusunnya Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinasl Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022;
3. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (renja) Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2017 - 2022

4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalm upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra tahun 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bidang lingkungan hidup di daerah. Nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomenklatur BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilantik pada tanggal 29 Desember 2016.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Sedangkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

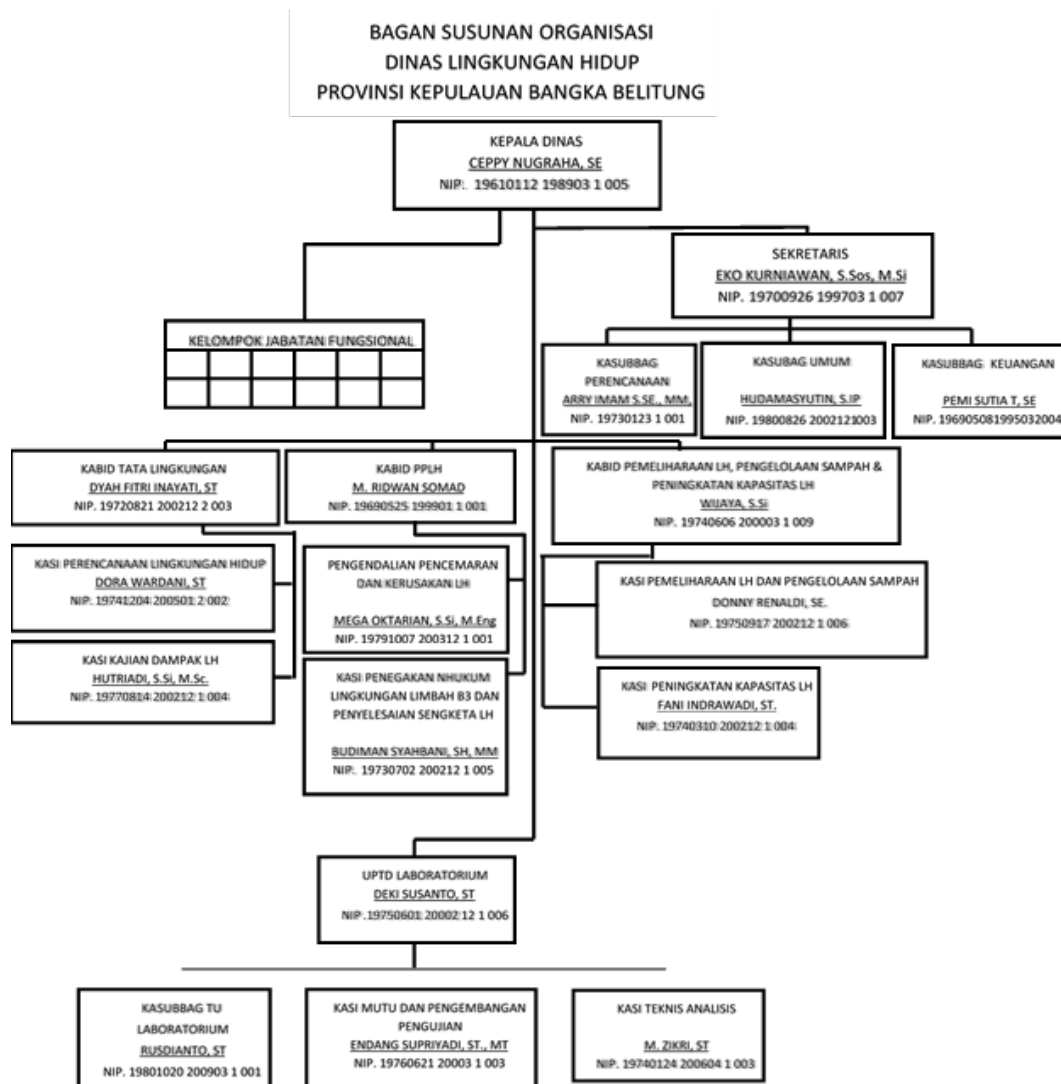
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016, susunan organisasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, meliputi ;
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Lingkungan;
 - a. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup;
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, Limbah B3, Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
5. Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

- a. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Sampah
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Struktur organisasi tersebut juga didukung oleh kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis (UPT) yang akan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang dinas khususnya dalam hal pemeriksaan sampel kualitas lingkungan. Dibawah ini adalah gambaran struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi DLH

Berikut ini adalah uraian Tugas Pokok dan fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Lingkungan Hidup meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengoordinasikan bidang-bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- b. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

- c. penyelenggaraan pengoordinasian dan sinkronisasi pembuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- d. penyelenggaraan pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- e. penyelenggaraan penyusunan dan penentuan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik Bruto (PDB) & Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian serta sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion);
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan lingkungan hidup;
- i. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- j. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- k. penyelenggaraan dan pengoordinasian sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- l. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan Kajian, pengesahan Kajian, fasilitasi keterlibatan

- masyarakat dalam pelaksanaan Kajian , fasilitasi pembinaan dan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi;
- m. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya pengelolaan lingkungan hidup-Upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
 - n. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - o. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan izin lingkungan;
 - p. penyelenggaraan dan pengoordinasian penilaian terhadap dokumen lingkungan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal)/Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana pengelolaan lingkungan hidup-Rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL) dan Upaya pengelolaan lingkungan hidup-Upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) /Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dan dokumen lingkungan lainnya;
 - q. penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan kesekretariatan Komisi Penilai Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal);
 - r. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan terhadap proses penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan;
 - s. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan lisensi komisi penilai

- Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) Kabupaten/Kota;
- t. penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi kinerja penatalaksanaan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), Upaya pengelolaan lingkungan hidup-Upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), dokumen lingkungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku terhadap Komisi Penilai Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) Kabupaten/Kota dan instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota;
 - u. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan dan penyusunan bahan materi rekomendasi keputusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup, rekomendasi Upaya pengelolaan lingkungan hidup-Upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), dan izin lingkungan, serta keputusan lingkungan hidup lainnya;
 - v. penyelenggaraan dan pengoordinasian dokumentasi dan pengolahan data pendukung di bidang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal)/Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana pengelolaan lingkungan hidup-Rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL) dan Upaya pengelolaan lingkungan hidup-Upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) /Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dan dokumen lingkungan lainnya;
 - w. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - x. penyelenggaraan evaluasi dan laporan; dan
 - y. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian dan penaatan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemantauan kualitas air; kualitas udara; kualitas tanah; kualitas pesisir dan laut;
- b. penyelenggaraan verifikasi bahan penentuan baku mutu lingkungan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pemantauan, penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian), dan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. penyelenggaraan verifikasi bahan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- e. penyelenggaraan koordinasi pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- f. penyelenggaraan verifikasi bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. penyelenggaraan koordinasi pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- h. penyelenggaraan koordinasi pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. penyelenggaraan koordinasi penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, pemantauan dan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian), serta pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- j. penyelenggaraan verifikasi bahan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. penyelenggaraan koordinasi pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan evaluasi terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. penyelenggaraan koordinasi pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- m. penyelenggaraan koordinasi pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- n. penyelenggaraan koordinasi penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. penyelenggaraan koordinasi penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- p. penyelenggaraan verifikasi bahan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

- q. penyelenggaraan koordinasi proses perizinan bagi pengumpul limbah B3 dan proses perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten/Kota;
- r. penyelenggaraan koordinasi proses perizinan penimbunan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan, penyediaan sarpras pengolahan, pengembangan teknologi pengelolaan, serta pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dilakukan lintas Kabupaten/Kota;
- s. penyelenggaraan verifikasi bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- t. penyelenggaraan koordinasi fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan verifikasi atas pengaduan, rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- u. penyelenggaraan koordinasi bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- v. penyelenggaraan koordinasi sosialisasi tata cara pengaduan dan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- w. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- x. penyelenggaraan evaluasi dan laporan: dan

y. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi perlindungan sumber daya alam;
- b. penyelenggaraan koordinasi pengawetan sumber daya alam;
- c. penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. penyelenggaraan koordinasi pencadangan sumber daya alam;
- e. penyelenggaraan koordinasi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. penyelenggaraan koordinasi inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- g. penyelenggaraan koordinasi perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. penyelenggaraan verifikasi bahan penetapan kebijakan dan penyelenggaraan konservasi, pemanfaatan

- berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. penyelenggaraan koordinasi pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati;
 - j. penyelenggaraan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - k. penyelenggaraan koordinasi pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - l. penyelenggaraan verifikasi bahan perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
 - m. penyelenggaraan verifikasi bahan penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - n. penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPA/TPST) Regional, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota), penyediaan sarpras pengolahan sampah, perencanaan dan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPA/TPST) Regional, penetapan stasiun peralihan antara dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota, pengembangan teknologi pengelolaan sampah serta pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

- o. penyelenggaraan verifikasi bahan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. penyelenggaraan koordinasi identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- q. penyelenggaraan verifikasi bahan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- r. penyelenggaraan koordinasi penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s. penyelenggaraan verifikasi bahan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, fasilitasi kerjasama dan

pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

- t. penyelenggaraan koordinasi pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- u. penyelenggaraan koordinasi peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh serta pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat/perseorangan peduli lingkungan hidup serta identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan dan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- v. penyelenggaraan koordinasi verifikasi bahan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup, pengembangan jenis penghargaan, penilaian dan pemberian penghargaan dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional serta pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- x. penyelenggaraan evaluasi dan pembuatan laporan sesuai bidang tugasnya; dan
- y. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTB)

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi badan sesuai dengan ketrampilan, keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok , yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja masing-masing.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Kepegawaian

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per bulan Juni 2017 berjumlah 95 orang yang terdiri dari ASN 64 orang dan honorer 31 orang (laboran, sopir, cleaning service, serta tukang kebun). Adapun rincian pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat pendidikannya sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

No	Kriteria (Berdasarkan)	Rincian	Pegawai		
			L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6
	Pangkat/ Golongan	Golongan IV	7	1	8
		Golongan III	23	27	50
		Golongan II	2	3	5
		Golongan I	0	0	0
		Non Golongan	19	13	32
Jumlah			51	44	95

No	Kriteria (Berdasarkan)	Rincian	Pegawai		
			L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6
	Pendidikan	S3	0	0	0
		S2	9	1	10
		S1	19	29	48
		D. IV	0	0	0
		D. III	6	5	11
		D.I	0	0	0
		SMA / sederajat	16	8	24
		SMP/ sederajat	1	1	2
		SD / sederajat	0	0	0
Jumlah			51	44	95
	Jabatan	Struktural			
		- Eselon II	1	0	1
		- Eselon III	4	1	5
		- Eselon IV	9	3	12
		Fungsional Tertentu	2	5	7
		Fungsional Umum	16	22	38
		Honorer	19	13	32
Jumlah			51	44	95
	Diklat	Prajabatan	32	31	63
		PIM IV	5	14	19
		PIM III	7	1	8
		PIM II	1	0	1
Jumlah			45	46	91

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

B. Sarana dan Prasarana Instansi

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi untuk mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

Tabel 2.2. Sumber Daya Aset/Modal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

No	Uraian Aset	Jumlah	Keadaan	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1	Bangunan Gedung Permanen	8	5	3
2	Bangunan Gedung Semi Permanen	1	-	1
3	Gedung Pos Jaga Permanen	9	8	1
4	Bangunan Gedung Garasi	2	2	-
5	Rumah Negara	22	5	17
6	Kendaraan Roda 4	4	4	-
7	Kendaraan Roda 2	25	25	-

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi untuk mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

1. Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 2 (dua) gedung yaitu gedung utama yang dipergunakan untuk ruang kerja, 1 ruang rapat, 1 ruang arsip, 1 ruang Mushala, 1 dapur, 3 kamar mandi, 1 tempat wudhu dan kolam di tengah bangunan kantor.

Selanjutnya gedung Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang perkantoran dan perlengkapan peralatan kantor serta peralatan laboratorium sebagai sarana untuk analisa laboratorium terutama analisa kualitas air.

2. Peralatan kantor
3. Peralatan Laboratorium
 - Pemeriksaan Kualitas Air
 - Pemeriksaan Kualitas Udara
4. Kendaraan

Pada akhir Tahun 2016 DLH Prov. Kep. Bangka Belitung memiliki kendaraan roda empat sebanyak 4 buah, 1 Kendaraan roda 2 (truk Laboratorium) dan kendaraan roda dua (sepeda motor) sebanyak 8 buah. Dari 4 buah kendaraan roda empat 2 buah merupakan kendaraan jabatan dan 2 buah kendaraan operasional, semua kondisinya layak. Dari 8 buah kendaraan roda dua semuanya layak jalan walaupun tahun perolehannya mulai dari tahun 2003-2007. Kondisi alat transportasi yang demikian relatif dapat mencukupi kebutuhan operasional DLH Prov. Kep. Bangka Belitung apabila ada pengaturan / penjadwalan penggunaan secara baik.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sasaran/target Renstra DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017 merupakan realisasi pencapaian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari tahun 2012-2016. Capaian ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berdasarkan realisasi pencapaian target pembangunan yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012 hingga 2016 dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir.

Evaluasi kegiatan tersebut meliputi seluruh program dan/atau kegiatan yang terdapat Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016 yang dikelompokkan menurut kategori program kegiatan sesuai bidang Lingkungan hidup terhadap RPJMD dan kewenangan menurut pembagian wilayah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup di daerah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari tahun 2012-2016 program yang telah dijalankan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Program dalam RPJMD 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
10. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
11. Program Deleniasi dan Konservasi Sumber Daya Alam

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012-2016 telah melaksanakan sebanyak 11 (sebelas) program dan 104 (seratus empat) kegiatan.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi 15 (enam belas kegiatan) yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2012-2016 sebesar Rp.9.896.856.493,00. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi 22 (dua puluh dua) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2012-2016 sebesar Rp.18.449.729.500,00. Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi 2 (dua) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2012-2016 sebesar Rp.212.225.000,00. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang meliputi 4 (empat) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2012-2016 sebesar Rp.1.750.869.000. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang meliputi 3 (tiga) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2012-2016 sebesar Rp.325.887.400.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang meliputi 2 (dua) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2012-2016 sebesar Rp.479.190.000,00. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2012-2016 sebesar Rp.10.674.464.500,00. Program

perlindungan dan konservasi sumber daya alam meliputi 3 (tiga) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2012-2016 sebesar Rp.542.815.000,00. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi 20 (dua puluh) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2012-2016 sebesar Rp.2.680.152.800,00. Program Peningkatan Pengendalian Polusi meliputi 3 (tiga) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2012-2016 sebesar Rp.932.220.000,00. Program Deleniasi dan Konservasi Sumber Daya Alam meliputi 1 (tsatu) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2012-2016 sebesar Rp.174.975.700,00

A. Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode 2012-2016. Penyelenggaraan urusan Kehutanan pada tahun 2012 capaian program dan kegiatannya mencapai 88,24%. Pada tahun 2013 capaian program dan kegiatan mencapai 83,10%. Pada tahun 2014 capaian program dan kegiatan mencapai 96,04 (%. Pada tahun 2015 capaian program dan kegiatan mencapai 50,97%. Sedangkan pada tahun 2016 capaian program dan kegiatan mencapai 87,16%.

Adapun jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 8 program dan 26 kegiatan, tahun 2013 sebanyak 11 program dan 30 kegiatan, tahun 2014 sebanyak 8 program dan 42 kegiatan, tahun 2015 sebanyak 8 program dan 63 kegiatan, dan tahun 2016 sebanyak 9 program dan 53 kegiatan.

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan target

No	Tahun			Capaian
		Program	Kegiatan	
1	2012	8	26	88,24%
2	2013	11	30	93,10%
3	2014	8	42	96,45%
4	2015	8	63	50,97%
5	2016	9	53	87,16%

Standar Pelayan Minimal (SPM) dan target yang harus dicapai (**Tabel 2.2**) yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. SPM bidang lingkungan hidup Provinsi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi meliputi 3 pelayanan yaitu;

- Pelayanan informasi status mutu air;
- Pelayanan informasi status mutu udara ambien;
- Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tabel 2.4 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup

Target Capaian Nasional SPM (%)						
No.	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Status Mutu air	100	100	100	100	100
2.	Status Mutu udara Ambien	100	100	100	100	100
3.	Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat	100	100	100	100	100
Realisasi SPM Bidang Lingkungan						

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)						
No.	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Status Mutu air	100	100	100	-	100
2.	Status Mutu udara Ambien	100	100	100	-	100
3.	Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat	100	100	100	-	100

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang provinsi. Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan melalui penyusunan program pemanfaatan ruang. Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan berkelanjutan. Undang-undang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Rencana Strategis

Dengan perkataan lain hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya tampung dan daya dukung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Namun sampai dengan saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kegiatannya selalu berupaya memperhatikan kesetaraan gender. Hal ini dilakukan untuk mendukung Pemerintah dalam program kesetaraan gender dan agar kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH dapat berjalan sesuai dengan harapan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan provinsi;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas lingkungan Hidup; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup seperti yang dikemukakan diatas terdapat beberapa permasalahan dalam pelayanan urusan lingkungan hidup sebagai berikut :

Tabel T-III.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Degradasi kualitas lingkungan hidup	- Pencemaran kualitas air - Pencemaran Kualitas Udara - Kerusakan lahan dan ekosistem essensial lainnya	- Meningkatnya jumlah pemegang izin/usaha yang berampak langsung terhadap peningkatan pencemaran air dan udara - Isu Lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi - Kebijakan Sektor yang Parsial serta kerjasama antar sektor yang masih perlu ditingkatkan
	Masih rendahnya ketaatan izin/usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	Rendahnya Ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan semua kewajiban dalam pengelolaan lingkungan Hidup	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Harmonisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan SDA	perencanaan tata ruang
		Pengukuhan kawasan hutan	belum selesainya tata batas (secara temu gelang)
		Resolusi konflik agraria	perizinan dan sistem perizinan
2	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rendahnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	penegakan hukum yang lemah sehingga kurang memberikan efek jera
			lemahnya kapasitas aparatur
			kurang pemahaman aturan hukum
			kurangnya jumlah personil
			kekurangan dana operasional
3	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial	Kemiskinan sekitar kawasan hutan	pemberdayaan masyarakat belum optimal
		Rendahnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	kurangnya pemahaman masyarakat tentang Daerah Aliran Sungai dan fungsi DAS
		Masih luasnya lahan kritis	kurangnya
4	PDRB Sub Sektor Kehutanan	Masih Rendahnya Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	belum optimalnya pengelolaan dan produksi HHBK
			masih rendahnya usaha Industri

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Kehutanan
			belum tersedianya data dan informasi HHK dan HHBK secara optimal

Permasalahan pembangunan telah dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022. Untuk urusan wajib lingkungan hidup, permasalahan mendasar tersebut adalah :

1. Pengelolaan SDA seperti sumberdaya tambang, yang masih mengabaikan kelestarian lingkungan akan mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan kualitas-kuantitas SDA;
2. Kurang berfungsinya aparaturnya penegak hukum dalam menindak permasalahan permasalahan lingkungan lingkungan dapat mengakibatkan makin maraknya kegiatan kerusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat mengancam keberadaan SDA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup;
4. Permasalahan banjir;
5. Degradasi lingkungan sungai dan pantai akibat pertambangan;
6. Belum optimalnya pengelolaan lahan kritis.

Faktor kunci keberhasilan merupakan kondisi yang *controllable* dan *uncontrollable* yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan strategi yang tepat, demi keberhasilan organisasi

dalam mencapai visi dan misinya. Sesuai dengan sifatnya, umumnya faktor-faktor internal adalah faktor yang *controllable* meliputi aspek sumberdaya manusia, sistem, prosedur kerja serta manajemen organisasi. Sedangkan faktor eksternal cenderung dipandang sebagai faktor yang *uncontrollable*. Sehingga dengan menyelaraskan faktor *controllable* dan *uncontrollable* dari faktor-faktor kunci keberhasilan, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menetapkan strategi yang tepat untuk menjamin keberhasilan organisasi.

Sehingga dapat diketahui bahwa beberapa faktor kunci keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai suatu organisasi pengawasan lingkungan hidup di daerah yakni sebagai berikut :

1. Komunikasi dan jejaring kerja yang baik antar unit;
2. Pendanaan yang belum mencukupi untuk merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan;
3. Diklat-diklat teknis di bidang lingkungan banyak belum diikuti/dikuasai pelaksana teknis;
4. Media massa yang semakin banyak meliput masalah lingkungan;
5. Isu lingkungan merupakan isu global dan melekat pada semua sektor;
6. Luasnya sebaran dan cepatnya degradasi kualitas lingkungan yang terjadi;
7. Kepedulian dan kesadaran lingkungan masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan, maka dapat secara tepat diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya.

Perumusan ditetapkan dengan memperhatikan posisi kekuatan organisasi dan faktor kunci keberhasilan yang dimiliki bahwa dengan memobilisasi atau mengoptimalkan kekuatan kunci dapat disusun suatu tujuan antara dalam mencegah ancaman kunci. Tujuan yang dirumuskan bersifat inovatif atau modifikasi maupun pembaharuan di bidang tertentu guna mencegah ancaman kunci, dimana telah dirumuskan beberapa tujuan berikut ini :

1. Meningkatkan peran serta segenap unsur masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan upaya-upaya pemantauan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian terhadap potensi dan pemanfaatan sumberdaya alam serta kerusakan lingkungan yang terjadi;
3. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai kelembagaan/mitra/instansi/institusi terkait serta meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi tentang lingkungan beserta perangkat perundangan yang mengaturnya.

Strategi merupakan sarana dalam mencapai tujuan. Strategi adalah seni memadukan atau menginteraksikan antar faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi dalam mencapai tujuan. Manfaat strategi adalah untuk mengoptimalkan sumberdaya unggulan dalam memaksimalkan pencapaian sasaran kinerja.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada

umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 berisikan strategis yang merupakan penjabaran Prioritas Nasional, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Keberhasilan manajemen dalam organisasi sebenarnya terlihat dari kemampuan organisasi beradaptasi terhadap lingkungan strategis yang berubah sedemikian cepat. Selain data-data historis yang dimiliki organisasi sebagai pendukung perencanaan, organisasi juga harus tanggap terhadap lingkungan eksternal dan sektor-sektor lain yang terkait. Oleh karena itu organisasi dalam suatu perencanaan harus melakukan analisis lingkungan strategis. Strategis dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan memperhatikan misi 1 yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah yang bertujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat, dan misi 6 yaitu bertujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian air, udara, lahan dan GRK. Sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, adapun sasaran yang ingin dicapai dari misi tersebut adalah :

- Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup

Dengan Indikator Kinerja sasaran :

1. Indeks kualitas air sungai
2. Indeks Kualitas udara
3. Indeks tutupan lahan
4. Indeks Gas Rumsh Kaca (GRK)

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”. Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. ***Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.

2. **Sejatera** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Teknologi** dimaknai dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi .

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Pembangunan ekonomi** adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat

dari pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah perkapita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

- b. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah.

Tujuan:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah
- b. Meningkatkan Daya saing Daerah Unggul dalam Inovasi Agrobahari
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

Sasaran:

- a. Penurunan Tingkat Pengangguran
- b. Penurunan Tingkat kemiskinan
- c. Menekan Laju Inflasi
- d. Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk
- e. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi
- f. Perwujudan kemandirian energi dan mendorong penciptaan energi baru terbarukan
- g. Peningkatan pembangunan berbasis industri
- h. Peningkatan Produksi dan nilai tambah sektor pertambangan yang berwawasan lingkungan
- i. Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perikanan

- j. Peningkatan produksi dan nilai tambah sektor perkebunan
- k. Peningkatan pengembangan Pembangunan pariwisata

2. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
- b. **Konektifitas daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan:

- a. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah;

Sasaran:

- a. Pembangunan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah;

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan mempunyai daya saing yang tinggi

Tujuan:

- a. Meningkatkan pembangunan Kualitas sumber daya manusia

Sasaran:

- a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat.

4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Kesehataan Masyarakat** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup

Tujuan:

- a. Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat

Sasaran:

- a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
- b. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi

Tujuan:

- a. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas

Sasaran:

- a. Peningkatan Manajemen Perubahan
- b. Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan
- c. Peningkatan Penataan dan penguatan organisasi
- d. Peningkatan Penataan Tata Laksana

- e. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- f. Peningkatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- g. Peningkatan Penguatan Pengawasan
- h. Perwujudan Pencapaian Opini Audit BPK
- i. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Pengendalian bencana** adalah mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana
- b. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan

Tujuan:

- a. Meningkatkan tata kelola kebencanaan
- b. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup

Sasaran:

- a. Menurunkan tingkat ancaman terhadap bencana
- b. Menurunkan tingkat kerugian terhadap bencana
- c. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana

d. Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup

Dari ke enam misi tersebut yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup adalah misi pertama dan ke enam yaitu **Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah** dan **Meningkatkan pengendalian bencana dan**

kualitas lingkungan hidup. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil peran untuk mewujudkan Pembangunan kawasan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan Kualitas lingkungan hidup yang dijabarkan dengan tujuan sebagai Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [IKLH], yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas daerah sasaran sebagai berikut:

- Indeks Air
- Indeks Udara
- Indeks Tutupan Lahan
- Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

A. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Dalam melaksanakan mandatnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada peraturan perundangan Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat paradigma perlindungan dan pengelolaan LH, antara lain:

1. Tanggungjawab kelestarian dan pengelolaan lingkungan merupakan tanggungjawab kolektif, yang dilaksanakan melalui kesadaran dan penguatan kordinasi seluruh pihak, terutama dalam hal menyamakan persepsi tentang definisi pencemaran lingkungan;
2. Pengaturan yang jelas antara kewenangan pusat dan daerah dalam hal pengawasan LH;

3. Adanya pendayagunaan pendekatan ekosistem (*eco region*), yang dapat menjadi jembatan antara perencanaan pembangunan, penataan ruang, dan pertimbangan lingkungan hidup;
4. Adanya penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas. Ditunjang pula dengan penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;

Selain UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian LHK juga mengacu pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Peraturan Perundangan terkait substantif Lingkungan Hidup
2. Ratifikasi Undang-Undang Internasional
3. Peraturan Pemerintah dan Peraturan lain terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan mandat tersebut Kementerian Lingkungan Hidup, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, Kementerian LH menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian LH;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LH;

5. penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang di bidang lingkungan hidup.

B. Telaahan Renstra Kabupaten/ Kota

1. Renstra DLH Kabupaten Bangka

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka berdasarkan peraturan Bupati nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup.

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan di Kabupaten Bangka berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka tahun 2014-2018 adalah :

- Perubahan dan kerusakan bentang lahan akibat aktifitas penambangan dan perkebunan
- Perubahan iklim mikro
- Menurunnya kualitas air permukaan dan air tanah yang diakibatkan oleh aktifitas penambangan
- Meningkatnya timbunan sampah perkotaan
- Bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis karakteristik sampah semakin beragam
- Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan

- Kebaisaaan masyarakat yang selama ini terjadi adalah membuang sampah tidak pada TPS yang telah ada
- Sering terjadi penolakan dari masyarakat ketika akan dilakukan penempatan fasilitas/ sarana prasarana seperti tong sampah, TPS maupun kontainer disuatu lokasi, bahkan tong sampah sering hilang
- Semakin berkurangnya ruangterbuka hijau akibat perubahan lahan.

Selanjutnya dalam menjabarkan visi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka yaitu : "Pengelolaan Sumber Daya AlamYang Lestari dan Lingkungan yang Bersih Menuju Bangka Mermartabat", maka ditetapkanlah misi DLH yaitu meningkatkan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Tujuan adalah meningkatkan kualitas dan fungsi lingklungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam dengan sasaran :

- Meninghkatnya kualitas Lingkungan Hidup
- Meningkatnya pengendalian Meningkatnya penanganan sampah
- Meningkatnya ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan
- sumber daya alam dan lingkungan

2. Renstra Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah terdapat perubahan nomenklatur dari Badan Lingkungan Hidup meningkat menjadi Dinas

Lingkungan Hidup maka dengan ini penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Tugas DLH Kabupaten Bangka Tengah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam mencermati renstra kabupaten Bangka Tengah, tidak terlepas dari isu-isu seputar lingkungan hidup

yang menjadi permasalahan di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu :

- Tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup akibat dari penambangan ilegal, pembukaan perkebunan, pengembangan pemukiman dan lain-lain
- Masih kurangnya ruang terbuka hijau publik bagi masyarakat.
- Pengelolaan sampah yang belum maksimal.
- Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang masih kurang.
- Masih rendahnya pengetahuan dan tingkat kepedulian masyarakat dan pengusaha tentang pentingnya kelestarian lingkungan.
- Belum maksimalnya pengelolaan penggunaan lahan di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Mangkol.
- Belum tersedianya data kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- Masih perlunya peningkatan akuntabilitas kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga terciptanya pemerintahan yang efektif dan transparan.

Selanjutnya dalam mendukung Visi Misi Kepala daerah, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bangka Tengah mendukung misi Ke 4 dari misi Kepala Daerah yaitu Mewujudkan lingkungan yang aman, asri dan lestari serta berkelanjutan dengan tujuan dan sasaran Kabupaten Bangka Tengah yang harus didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup sehingga tercapailah apa yang menjadi tujuan dan sasaran kepala daerah.

Tujuan kedua pada misi keempat Kabupaten yaitu Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Penanggulangan Bencana yang Handal, Saran untuk mencapai tujuan tersebut adalah Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas.

Tujuan dari dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah adalah :

- a. Terwujudnya lingkungan yang berkualitas untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Desa dan Kelurahan.
- c. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik.

Sedangkan sasaran jangka menengah yang hendak dicapai adalah untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah :

- a. Terkelola dan terkendalnya dampak lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan.
- b. Terjaganya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup.
- c. Terpenuhinya dan terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan.
- d. Meningkatnya perencanaan, perlindungan, dan pemanfaatan TAHURA Bukit Mangkol.
- e. Terkelolanya sampah di Kabupaten.
- f. Meningkatnya peran serta desa dan kelurahan dalam pengelolaan persampahan.
- g. Meningkatnya kualitas kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif dan juga hasil keseluruhan proses KLHS. Berdasarkan hasil keseluruhan proses KLHS, maka telah dirumuskan beberapa rekomendasi KLHS yang harus diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program RPJMD 2017-2022, sebagai berikut.

1. Merevisi beberapa indikator kinerja program pada beberapa kebijakan umum, antara lain:
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat Belinyu, Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok, Pengembangan Kawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik, Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok tidak perlu adanya kegiatan pembangunan pemecah gelombang. Sebagai kompensasinya, pemecah gelombang alami berupa hutan mangrove yang masih ada perlu dipertahankan dan ditambah ketebalannya.
 - b. Pengembangan kawasan mandiri terpadu (KTM Batu Betumpangan dan KTM Gantung) perlu memasukkan indikator tingkat produktivitas pertanian dan tingkat kesejahteraan petani (transmigran).
 - c. Pada Kebijakan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Sektor Kelautan dan Perikanan; Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Produk Pertanian Khususnya Komoditas Karet, Lada dan Sapi; serta Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Kepariwisata; indikatornya perlu dibuat lebih rinci dan perlu disebutkan lokasi kegiatan.

- d. Judul kebijakan umum Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Kepariwisata perlu diganti menjadi Kebijakan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Kepariwisata
 - e. Pada kebijakan umum Peningkatkan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Industri Pengolahan Sumber Daya Alam Pertambangan Khususnya Sumberdaya Alam Pertambangan Timah, untuk indikator kinerja Pertumbuhan industri pengolahan pertambangan timah diubah menjadi Pertumbuhan industri pengolahan pertambangan timah dan mineral ikutannya.
2. Memasukkan program pencegahan dan mitigasi bencana di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Gantung.
 3. Mengintegrasikan rumusan mitigasi dan/atau alternatif kedalam bentuk program-program disertai dengan indikator-indikator, waktu pelaksanaan dan pembiayaannya. Untuk lebih jelasnya dapat melihat hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif.
 4. Setiap rencana pengembangan kawasan strategis perlu didahului dengan penyusunan rencana induk pengembangan (RIP) dan rencana strategis (renstra) dan dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebelum dilakukan pembangunan fisik.
 5. Untuk beberapa kebijakan yang berlokasi di area yang di dalamnya terdapat kawasan lindung, seperti: 1) Pengembangan kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga, 2) pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera, 3) Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat, dan 4) Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung dan kawasan lintas timur Pulau

- Bangka, perlu memilih lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dengan tidak mengganggu area kawasan lindung yang ada di dalamnya.
6. Pemerintah Provinsi harus segera menerbitkan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) sebagai pedoman penggunaan ruang pesisir dan laut untuk mendukung sejumlah kebijakan pengembangan kawasan strategis yang berada di wilayah pesisir dan laut.
 7. Dalam pengembangan kawasan peruntukan pariwisata perlu memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, mengingat sebagian besar lokasi pengembangan sudah dikelola oleh masyarakat melalui BUMDes maupun karang taruna.
 8. Pemerintah Provinsi perlu memetakan dan menetapkan kawasan produksi pangan provinsi agar kebijakan/program pemantapan ketahanan pangan lebih fokus pada kawasan tertentu dan mencegah terjadinya perubahan peruntukan kawasan pertanian untuk kepentingan non pertanian.
 9. Pemerintah provinsi perlu segera mengidentifikasi dan menginventarisasi kawasan lindung yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencegah terjadinya okupasi oleh masyarakat dan perubahan fungsi lindung. Selanjutnya hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut dikukuhkan dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Lindung di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 10. Untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang berlebihan di masa datang, pemerintah perlu memfasilitasi dan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membangun instalasi pengolahan air bersih beserta jaringan penyalurannya dengan air baku berasal dari air permukaan seperti air kolong dan air sungai terdekat.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Dalam melakukan perencanaan tidak terlepas dari berbagai isu-isu yang berkembang di masyarakat. Isu-isu tersebut diformulasikan menjadi isu strategis.

Potensi dan permasalahan yang terbentuk akibat perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal adalah kunci dalam menyusun perencanaan strategis. Perencanaan itu sendiri disusun, dengan mengacu pada peraturan-perundangan yang terkait secara substansial terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun dalam kaitan tatakelola kelembagaan. Secara umum, permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2015–2019, masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah, dan limbah B3, terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, serta kerusakan lahan dan ekosistem-ekosistem sensitif lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, urusan wajib lingkungan hidup telah menjadi tugas dari Dinas Lingkungan hidup dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Derdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 dijelaskan bahwa permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk

mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Permasalahan pembangunan telah dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022. Untuk urusan wajib lingkungan hidup, permasalahan mendasar tersebut adalah :

7. Pengelolaan SDA seperti sumberdaya tambang, yang masih mengabaikan kelestarian lingkungan akan mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan kualitas-kuantitas SDA;
8. Kurang berfungsinya aparaturnya penegak hukum dalam menindak permasalahan permasalahan lingkungan lingkungan dapat mengakibatkan makin maraknya kegiatan merusak lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat mengancam keberadaan SDA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup;
10. Permasalahan banjir;
11. Degradasi lingkungan sungai dan pantai akibat pertambangan;
12. Belum optimalnya pengelolaan lahan kritis.

Dalam rangka penyelenggaraan rencana strategis, maka langkah yang perlu diperhatikan demi mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian dan analisis terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya. Ada beragam alat analisis yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan analisis manajemen ilmiah yang komprehensif. Tetapi tidak ada satu alat yang tepat

digunakan untuk semua kegiatan analisis. Alat analisis itu lebih bersifat komplementer atau saling melengkapi. SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats*) adalah salah satu alat analisis yang komprehensif dapat diterapkan dalam organisasi bisnis maupun non bisnis.

Untuk memudahkan pelaksanaan analisis SWOT perlu disusun suatu kerangka analisis SWOT melalui beberapa tahapan analisis berikut :

1. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, yakni identifikasi faktor internal dan eksternal;
2. Penilaian faktor keberhasilan melalui metoda komparasi matriks urgensi faktor internal dan eksternal serta matriks evaluasi faktor internal dan eksternal;
3. Penetapan faktor kunci keberhasilan dan peta posisi kekuatan;
4. Perumusan dan penentuan tujuan;
5. Penetapan sasaran dan kinerja;
6. Penetapan strategi dan rencana kegiatan, berupa implementasi strategi ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
7. Rencana pelaksanaan;
8. Monitoring dan evaluasi;

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*Strength/kekuatan* dan *Weaknesses/kelemahan*) dan kondisi eksternal (*Opportunities/peluang* dan *Threats/ancaman*) yang melekat pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka dapat diidentifikasi faktor lingkungan yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi yang langsung berpengaruh terhadap kinerja

organisasi. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang melekat dalam kendali organisasi yang potensial memberikan keuntungan sekaligus hambatan dalam peningkatan kinerja organisasi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kendali organisasi yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi karena akan memberikan peluang dan ancaman pada peningkatan kinerja. Identifikasi kepada aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

1. Kekuatan

Beberapa kekuatan (*strength*) yang bisa digunakan, antara lain sebagai berikut :

- a. Ketersediaan instrumen/produk hukum/peraturan perundangan yang mengatur masalah lingkungan hidup,
- b. Tersedianya UPT Laboratorium Lingkungan
- c. Tersedianya tenaga Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) sebanyak 9 orang
- d. Telah tersedianya SOP AMDAL, dan SOP Pengawasan Lingkungan/ Penegakan Hukum
- e. Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan/atau kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan

2. Kelemahan

Beberapa kelemahan (*weaknesses*) yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

- a. Masih minimnya data SDA LH
- b. Kurangnya SDM PPNS dan PPLH, serta SDM perencanaan dan perencanaan lingkungan
- c. Kualitas SDM yang ada masih kurang

- d. Kurangnya sarana dan prasarana (belum tersedia tempat/ruang untuk posko pengaduan masyarakat, kurangnya jumlah ruangan yang representatif, kurangnya mobil operasional)

3. Peluang

Beberapa peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya isu perubahan iklim yang telah mendunia yang menekan kita untuk melakukan pengelolaan lingkungan dengan lebih baik
- b. Adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk melakukan KLHS pada Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, serta kegiatan yang berdampak/beresiko terhadap lingkungan hidup
- c. Adanya penghargaan dari pemerintah pusat terhadap kepala daerah yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan hidup terbaik (nirwasita tantra)
- d. Adanya instrumen untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup (PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, KALPATARU, SPM Bidang Lingkungan dsb.)
- e. Adanya dukungan dan kerja sama dengan komunitas masyarakat pemerhati lingkungan
- f. Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan CSR

4. Ancaman

Beberapa Ancaman atau tantangan (*threats*) yang perlu diantisipasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Kondisi lingkungan yang semakin buruk dengan semakin menurunnya daya dukung daya tampung lingkungan hidup,

- b. Perekonomian masyarakat yang masih rendah sehingga mendorong eksploitasi SDA secara illegal,
- c. Masih minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait regulasi lingkungan hidup
- d. Jumlah penduduk yang semakin meningkat yang mempengaruhi jumlah kebutuhan ruang, air bersih, sanitasi, dan ketersediaan SDA
- e. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terus-menerus sehingga menjadikan lingkungan sulit untuk memulihkan diri seperti semula
- f. Laju pembangunan yang tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan,
- g. Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang kurang taat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup sesuai yang tertera dalam izin lingkungan,
- h. Semakin besarnya timbulan sampah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat pada misi ke 6 yaitu **Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup**. Terdapat 2 muatan tujuan yang terkandung di dalam misi ke enam yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola kebencanaan
2. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup

Terkait dengan tugas utama pelayanan Dinas lingkungan hidup maka Dinas lingkungan Hidup mengambil peran pada tujuan yang kedua yaitu Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [IKLH], yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas daerah sasaran sebagai berikut:
 - 1) Indeks Air
 - 2) Indeks Udara
 - 3) Indeks Tutupan Lahan
 - 4) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Seiring dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Meningkatkan Penyelenggaraan prinsip pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, perkebunan, perternakan, Kehutanan, perikanan, pariwisata dan industri melalui kajian lingkungan hidup Strategis
- b. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Laboratorium Lingkungan terhadap terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- c. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara
- d. Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
- f. Meningkatkan Penyelenggaraan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui Rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta kajian lingkungan hidup Strategis
- g. Meningkatkan pengelolaan Sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dari sektor limbah

2. Sasaran

- a. Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, peternakan dan Kehutanan

- b. Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sub sektor perikanan
- c. Meningkatkan pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sektor pariwisata
- d. Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sektor industri
- e. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Laboratorium Lingkungan terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- f. Terjaganya Kualitas air di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Baku mutu
- g. Terjaganya Kualitas Udara dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- h. Meningkatnya upaya konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati
- i. Meningkatnya Kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- j. Meningkatkan Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- k. Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan serta Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor
- l. Meningkatnya sistem kajian dampak lingkungan yg efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan
- m. Meningkatnya pengelolaan dan penanganan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan prinsip pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, perikanan, pariwisata dan industri melalui kajian lingkungan hidup Strategis	Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, peternakan dan Kehutanan	Jumlah dokumen KLHS yang terintegrasi dalam Perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, peternakan dan Kehutanan		2 Dokumen			
		Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sub sektor perikanan	Jumlah dokumen KLHS yang terintegrasi dalam Perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sub sektor perikanan		1 Dokumen			
		Meningkatkan pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan	Jumlah dokumen KLHS yang terintegrasi dalam Perencanaan pembangunan			4 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		pembangunan berkelanjutan pada sektor pariwisata	berkelanjutan pada sektor pariwisata					
		Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sektor industri	Jumlah dokumen KLHS yang terintegrasi dalam Perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sektor industri		3 Dokumen	1 Dokumen		
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Laboratorium Lingkungan terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Laboratorium Lingkungan	Persentase Pertumbuhan Pendapatan asli daerah dari Laboratorium lingkungan	0,05%	1%	1,15%	2%	2,50%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara	Terjaganya Kualitas air di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Baku mutu	Persentase Peningkatan Titik Pantau badan air yang memenuhi baku mutu	10%	15%	20%	25%	30%
		Terjaganya Kualitas Udara dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Titik Pantau udara yang memenuhi baku mutu	50%	55%	60%	65%	70%
4	Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati	Persentase peningkatan Luas lahan kritis yang terehabilitasi dan terevegetasi di luar kawasan hutan		5%	6%	7%	8%
5	Meningkatkan peran serta	Meningkatkan peran serta masyarakat dan	Jumlah Usaha/Kegiatan	35 Usaha/	40 Usaha	45 Usaha	50 Usaha/	55 Usaha/

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	yang yang diawasi tergolong taat	Kegiatan	/Kegiatan	/Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
		Meningkatkan Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup	28 Kelompok	31 Kelompok	35 Kelompok	38 Kelompok	40 Kelompok
6	Meningkatkan Penyelenggaraan prinsip pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, perkebunan, perternakan, Kehutanan, perikanan, pariwisata dan industri melalui	Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan serta Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor	Jumlah dokumen RPPLH dan KLHS yang teritegrasi dalam Perencanaan pembangunan berkelanjutan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kajian lingkungan hidup Strategis							
7	Meningkatkan pengelolaan Sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dari sektor limbah	Meningkatnya sistem kajian dampak lingkungan yg efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Persentase Pertumbuhan Usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	10%	18%	25%	31%	36%
		Meningkatnya pengelolaan dan penanganan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Sampah di TPA Sampah Regional	0	0	5%	10%	15%

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Didalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 terdapat tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan indikator kinerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pada misi 6 **Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup**. Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berperan dalam mendukung pembangunan bidang lingkungan hidup telah menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai turunan dari Tujuan dan Sasaran dari RPJMD.

Berikut ini adalah Keterkaitan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta target Kinerja sasaran pada periode tahun 2017 – 2022 yang tersaji pada tabel tersaji pada tabel 4.2 berikut ini

Tabel 4.2. Tabel keterkaitan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi	:	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"				
Misi 1	:	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS POTENSI DAERAH				
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	Meningkatkan Penyelenggaraan prinsip pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, perikanan, pariwisata dan industri melalui kajian lingkungan hidup Strategis	Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, peternakan dan Kehutanan	Jumlah dokumen KLHS yang terintegrasi dalam Perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, peternakan dan Kehutanan	
	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	Meningkatkan Penyelenggaraan prinsip pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, perikanan, pariwisata dan	Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sub sektor perikanan	Jumlah dokumen KLHS yang terintegrasi dalam Perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sub sektor perikanan	

Visi	:	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"				
Misi 1	:	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS POTENSI DAERAH				
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			industri melalui kajian lingkungan hidup Strategis			
	Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata dengan indikator kinerja sasaran Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara	jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara	Meningkatkan Penyelenggaraan prinsip pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, perkebunan, perternakan, Kehutanan, perikanan, pariwisata dan industri melalui kajian lingkungan hidup Strategis	Jumlah dokumen KLHS yang terintegrasi dalam Perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sektor pariwisata	Jumlah dokumen KLHS yang terintegrasi dalam Perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sektor pariwisata	
	Meningkatnya pembangunan berbasis industri dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	Meningkatkan Penyelenggaraan prinsip pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, perkebunan, perternakan, Kehutanan, perikanan, pariwisata dan industri melalui	Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sektor industri	Jumlah dokumen KLHS yang terintegrasi dalam Perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sektor industri	

Rencana Strategis 2017-2022

Visi	:	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"				
Misi 1	:	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS POTENSI DAERAH				
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			kajian lingkungan hidup Strategis			
Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	Meningkatnya belanja pemerintah daerah dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah	Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Laboratorium Lingkungan terhadap terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Laboratorium Lingkungan	Persentase Pertumbuhan Pendapatan asli daerah dari Laboratorium lingkungan	

Visi	:	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"				
Misi 6	:	MENINGKATKAN PENGENDALIAN BENCANA DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Indeks Air	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas melalui upaya pencegahan dan pengendalian	Terjaganya Kualitas air di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Baku mutu	Persentase Peningkatan Titik Pantau badan air yang memenuhi baku mutu	

			pencemaran air dan udara			
		Indeks Udara		Terjaganya Kualitas Udara dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Titik Pantau udara yang memenuhi baku mutu	
		Indeks Tutupan Lahan	Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati	Persentase peningkatan Luas lahan kritis yang ter rehabilitasi dan terevegetasi di luar kawasan hutan	
		Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi tergolong taat	
				Meningkatkan Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup	
		Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Meningkatkan Penyelenggaraan prinsip pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, perkebunan, perternakan,	Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan serta Meningkatkan upaya pencegahan	Jumlah dokumen RPPLH dan KLHS yang terintegrasi dalam Perencanaan pembangunan berkelanjutan	

Rencana Strategis 2017-2022

			Kehutanan, perikanan, pariwisata dan industri melalui kajian lingkungan hidup Strategis	dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor		
		Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Meningkatkan pengelolaan Sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dari sektor limbah	Meningkatnya sistem kajian dampak lingkungan yg efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Persentase Pertumbuhan Usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	
				Meningkatnya pengelolaan dan penanganan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Sampah di TPA Sampah Regional	

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang ditetapkan, sesuai keterkaitan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu :

1. Misi 1 : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah,

Berikut adalah Sasaran dan strategi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat di dalam RPJMD 2017-2022 yang terkait dengan program peningkatan tata kelola lingkungan hidup pada misi 1.

Tabel V.1 Tujuan, sasaran dan strategi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait dengan urusan lingkungan Hidup pada misi I

VISI	:	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"		
MISI 1	:	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS POTENSI DAERAH		
Tujuan RPJMD		Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi		1. Meningkatkan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan perkebunan	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan kehuatanan	
		2. Meningkatkan produksi sub sektor perikanan	Mengembangkan kawasan sentra kelautan dan perikanan	
		3. Meningkatkan pengembangan pembangunan pariwisata	Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata	
		4. Meningkatkan pembangunan berbasis industri	Mengembangkan kawasan industri berbasis potensi daerah	
Meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat		5. Meningkatkan belanja pemerintah daerah	Meningkatkan pencapaian asli daerah	

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

2. Misi 6 : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran dan strategi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat di dalam RPJMD 2017-2022 yang terkait dengan program peningkatan tata kelola lingkungan hidup pada misi 6.

Tabel V.2 Tujuan, sasaran dan strategi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait dengan urusan lingkungan Hidup pada misi 6

VISI	:	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"		
MISI 6	:	MENINGKATKAN PENGENDALIAN BENCANA DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		
Tujuan RPJMD		Sasaran RPJMD		Strategi RPJMD
Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup		Peningkatan Kualitas Lingkungan		1. Meningkatkan kualitas air 2. Meningkatkan kualitas udara 3. Meningkatkan pengendalin dan pengawasan hutan 4. Meningkatkan Pengendalian terhadap lingkungan

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel V.3.

Tabel V.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Periode 2017-2022 Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

VISI	:	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"			
MISI 1	:	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS POTENSI DAERAH			
Tujuan	:	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Penyelenggaraan prinsip pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, perkebunan, perternakan, Kehutanan, perikanan, pariwisata dan industri melalui kajian lingkungan hidup Strategis		Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, peternakan dan Kehutanan		Meningkatkan fungsi KLHS sebagai instrumen Perencanaan Kawasan dlm Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu	Pelaksanaan KLHS Kawasan Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu
				Meningkatkan fungsi KLHS sebagai instrumen Perencanaan Kawasan Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelaksanaan KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sub sektor perikanan		Meningkatkan fungsi KLHS sebagai instrumen Perencanaan dalam pengembangan Kawasan Minapolitan Lepar Pongok	Pelaksanaan KLHS Kawasan Strategis Provinsi Minapolitan Lepar Pongok
				Meningkatkan fungsi KLHS sebagai instrumen Perencanaan dalam pengembangan Kawasan Strategis Provinsi etalase Perikanan Selat Nasik	Pelaksanaan KLHS Kawasan Strategis Provinsi etalase Perikanan Selat Nasik

Rencana Strategis 2017-2022

VISI	:	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"			
MISI 1	:	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS POTENSI DAERAH			
Tujuan	:	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sektor pariwisata		Meningkatkan fungsi KLHS sebagai instrumen Perencanaan dalam pengembangan Kawasan Strategis Provinsi ASDP Manggar - Ketapang	Pelaksanaan KLHS Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang
				Meningkatkan fungsi KLHS sebagai instrumen Perencanaan dalam pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang	Pelaksanaan KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pariwisata Tanjung kelayang
				Meningkatkan fungsi KLHS sebagai instrumen Perencanaan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	Pelaksanaan KLHS Kawasan Strategis Provinsi Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
				Meningkatkan fungsi KLHS sebagai instrumen Perencanaan Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	Pelaksanaan KLHS Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba
				Meningkatkan fungsi KLHS sebagai instrumen Perencanaan Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	Pelaksanaan KLHS Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung

Rencana Strategis 2017-2022

VISI	:	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"			
MISI 1	:	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS POTENSI DAERAH			
Tujuan	:	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
				Meningkatkan fungsi KLHS sebagai instrumen Perencanaan dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Pelaksanaan KLHS Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing
		Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sektor industri		Meningkatkan fungsi KLHS sebagai instrumen Perencanaan dalam pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	Pelaksanaan KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
				Meningkatkan fungsi KLHS sebagai instrumen Perencanaan Kawasan Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelaksanaan KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat
				Meningkatkan fungsi KLHS sebagai instrumen Perencanaan dalam pengembangan Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai	Pelaksanaan KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai
				Meningkatkan fungsi KLHS sebagai instrumen Perencanaan dalam pengembangan Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan	Pelaksanaan KLHS Kawasan strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Terpadu Teluk Belinyu

Rencana Strategis 2017-2022

VISI	:	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"			
MISI 1	:	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS POTENSI DAERAH			
Tujuan	:	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
				dan Industri Teluk Kelabat	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Laboratorium Lingkungan terhadap terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Laboratorium Lingkungan terhadap terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Meningkatkan kualitas layanan Laboratorium Lingkungan	Peningkatan Pelayanan dari aspek sumber daya manusia, sarana dan parasarana Laboratorium Lingkungan

VISI	:	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"			
MISI 6	:	MENINGKATKAN PENGENDALIAN BENCANA DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
Tujuan	:	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara		Terjaganya Kualitas air di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Baku mutu		Menurunkan tingkat pencemaran BOD,COD dan TSS sesuai Baku Mutu Kualitas Air di masing-masing titik pantau	Pelaksanaan Identifikasi kualitas air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		Terjaganya Kualitas		Meningkatkan Kualitas Air	Pemberdayaan Masyarakat

Rencana Strategis 2017-2022

VISI	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"			
MISI 6	:	MENINGKATKAN PENGENDALIAN BENCANA DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		
Tujuan	:	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		air di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Baku mutu	melalui keterlibatan peran serta masyarakat	dalam Pengendalian Pencemaran air
		Terjaganya Kualitas air di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Baku mutu	Penetapan Regulasi terkait Peningkatan kualitas air	Peningkatan instrumen dan Regulasi pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara		Terjaganya Kualitas Udara dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatkan Kualitas Udara di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelaksanaan Identifikasi kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan		Meningkatnya upaya konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati	Meningkatkan Tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Peningkatan Kemitraan guna pengelolaan lahan kritis di luar kawasan hutan
Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan		Meningkatnya upaya konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati	Meningkatkan Tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	Peningkatan Kemitraan guna pengelolaan lahan kritis di luar kawasan hutan

Rencana Strategis 2017-2022

VISI	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"			
MISI 6	:	MENINGKATKAN PENGENDALIAN BENCANA DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		
Tujuan	:	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan konservasi sumber daya alam dengan mengimplementasikan kearifan lokal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengelolaan taman Keanekaragaman Hayati serta Pelestarian budaya dan kearifan lokal
Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup		Meningkatnya Kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Meningkatkan penataan dan penegakan hukum lingkungan berdasarkan baku mutu lingkungan	Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha/kegiatan serta mengoptimalkan fungsi pos pengaduan masyarakat
Meningkatkan Penyelenggaraan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui Rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta kajian lingkungan hidup Strategis		Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan serta Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor	Meningkatkan fungsi RPPLH dan KLHS sebagai instrumen Perencanaan dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelaksanaan RPPLH dan KLHS wajib
		Meningkatnya sistem kajian dampak lingkungan yg efektif bagi usaha dan	Meningkatkan penyelenggaraan sistem kajian dampak lingkungan yg efektif bagi usaha dan kegiatan	Peningkatan layanan penilaian/pemeriksaan Dokumen Lingkungan

Rencana Strategis 2017-2022

VISI	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"				
MISI 6	:	MENINGKATKAN PENGENDALIAN BENCANA DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
Tujuan	:	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan			
Meningkatkan pengelolaan Sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dari sektor limbah		Meningkatnya pengelolaan dan penanganan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Meningkatkan Layanan persampahan skala Provinsi melalui optimalisasi fungsi TPA Sampah Regional	Peningkatan Kemitraan lintas wilayah dan lintas sektoral guna percepatan pembangunan Kawasan TPA Sampah Regional
				Meningkatkan Pengelolaan Persampahan melalui keterlibatan peran serta masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan persampahan
				Penetapan Regulasi terkait pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penyusunan instrumen dan Regulasi pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Tim Penyusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 -2022

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang pertama yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. Dan juga misi ke enam yaitu **Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup** dengan mengacu pada tujuan yang kedua yaitu Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dins Lingkungan Hidup adalah Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas daerah sasaran sebagai berikut :

- Indeks Air
- Indeks Udara
- Indeks Tutupan Lahan
- Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 5 (lima) program dan Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, terdiri dari 7 Kegiatan
 - a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Peningkatan Disiplin Aparatur
 - d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
 - f. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - g. Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
2. Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup, terdiri dari 22 kegiatan

- a. Penyusunan Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu
- b. Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- c. Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok
- d. Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik
- e. Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi ASDP – Manggar4
- f. Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang
- g. Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok
- h. Penyusunan Dokumen KLHS di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba
- i. Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung
- j. Penyusunan Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing
- k. Penyusunan Dokumen KLHS kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera
- l. Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Air Kelik
- m. Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat
- n. Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai
- o. Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat

- p. Penyusunan Dokumen Reviu Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)
 - q. Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
 - r. Penyusunan Dokumen Reviu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
 - s. Analisis data dan informasi Lingkungan Hidup
 - t. Layanan Penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan
 - u. Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/Kota
 - v. Penyediaan informasi AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan
3. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan, terdiri dari 6 kegiatan yaitu
- a. Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium
 - b. Peningkatan Mutu dan Pengembangan Laboatorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - c. Pembinaan laboratorium lingkungan Kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pengawasan lingkungan
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM UPTD Laboratorium Lingkungan
 - e. Layanan Sampling Parameter Kualitas Lingkungan bagi sektor usaha
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium
4. Program Peningkatan Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup, terdiri dari 10 kegiatan yaitu :
- a. Identifikasi Kualitas Air Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Beitung
 - b. Pengendalian Beban Pencemaran Air
 - c. Rencana Aksi Daerah dalam Peningkatan kualitas sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - d. Identifikasi kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- e. Fasilitasi peningkatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - f. Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan
 - g. Pemantauan dan Pengawasan Penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO)
 - h. Penataan Sanksi Administrasi terhadap izin lingkungan dan/atau izin PPLH oleh usaha/kegiatan
 - i. Verifikasi permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi
 - j. Penerimaan, penelaahan, dan verifikasi pengaduan masyarakat
5. Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari 12 Kegiatan, yaitu
- a. Pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - b. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati
 - c. Peningkatan upaya konservasi sumber daya alam melalui kemitraan dengan kelompok masyarakat dengan mengoptimalkan kearifan lokal
 - d. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup
 - e. Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup
 - f. Implementasi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim (Proklam)
 - g. Pemantauan dan Evaluasi Program Adipura
 - h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui kemitraan bersama PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - i. Studi Manajemen dan Produksi Persampahan

- j. Persiapan rencana Pra Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Terpadu Regional
- k. Operasional TPA Regional
- l. Inventarisasi emisi gas rumah kaca

Berikut adalah tabel 6.1 yang memusat

Target capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 5 tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci ditampilkan pada tabel 6.1

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan acuan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Kondisi awal juga menjadi pertimbangan dalam upaya untuk menentukan target kinerja serta memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2022. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut dapat di lihat pada tabe VII.1.

Tabel VII.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Tidak Ada		1 Dokumen				1 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Tidak Ada		1 Dokumen				1 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Tidak Ada		1 Dokumen				1 Dokumen
4	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Tidak Ada			1 Dokumen			1 Dokumen

Rencana Strategis 2017-2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi ASDP - Manggar yang digunakan dalam perencanaan Kawasan	Tidak Ada			1 Dokumen			1 Dokumen
6	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Tidak Ada				1 Dokumen		1 Dokumen
7	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Tidak Ada			1 Dokumen			1 Dokumen
7	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Tidak Ada			1 Dokumen			1 Dokumen
8	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim	Tidak Ada			1 Dokumen			1 Dokumen

Rencana Strategis 2017-2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan							
9	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Tidak Ada					1 Dokumen	1 Dokumen
	Tersedianya Dokumen KLHS kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Tidak Ada					1 Dokumen	1 Dokumen
	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Air Kelik yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Tidak Ada				1 Dokumen		1 Dokumen
10	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Tidak Ada		1 Dokumen				1 Dokumen

Rencana Strategis 2017-2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Tidak Ada		1 Dokumen				1 Dokumen
	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Tidak Ada		1 Dokumen				1 Dokumen
12	Jumlah Parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi untuk menunjang peningkatan PAD dari Laboratorium Lingkungan	28 Parameter	30 Parameter	32 Parameter	34 Parameter	36 Parameter	38 Parameter	38 Parameter
14	Rata-rata Penurunan konsentrasi BOD, COD dan TSS di masing-masing titik pantau	N/A	1%	1,5%	2%	2,5%	3%	3%
15	Persentase peningkatan Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengendalian pencemaran air	N/A	5%	10%	15%	20%	25%	25%

Rencana Strategis 2017-2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peraturan daerah terkait Peningkatan kualitas air yang diimplementasikan	Tidak Ada			1 Perda			1 Perda
	Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	N/A	2%	2%	2%	2%	2%	10%
	Luas lahan kritis yang terehabilitasi dan terevegetasi di luar kawasan hutan	N/A		10 Ha	15 Ha	15 Ha	15 Ha	55 Ha
	Persentase peningkatan Keikutsertaan Masyarakat dalam konservasi sumber daya alam	N/A		50%	60%	70%	80%	80%
	Peraturan daerah terkait Penetapan Taman kehati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak Ada				2 Dokumen		2 Dokumen
	Persentase penurunan sanksi administrasi yang dikeluarkan	36%	35%	30%	27%	25%	22%	22%
	Jumlah kader/kelompok masyarakat yang menerima penghargaan dalam		5%	10%	15%	20%	25%	25%

Rencana Strategis 2017-2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup							
	Tersedianya Dokumen RPPLH dan Dokumen KLHS wajib	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
	Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yg efektif bagi usaha dan kegiatan	N/A	6 Kali Penyelenggaraan	8 Kali Penyelenggaraan	10 Kali Penyelenggaraan	12 Kali Penyelenggaraan	14 Kali Penyelenggaraan	14 Kali Penyelenggaraan
	Persentase Layanan Persampahan skala regional	N/A			5%	10%	15%	15%
	Persentase peningkatan Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	N/A		5%	10%	15%	20%	20%
	Peraturan daerah terkait pengelolaan sampah yang diimplementasikan	Tidak Ada		1 Perda				1 Perda

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ini merupakan arah dan target kinerja pembangunan di Bidang lingkungan Hidup yang akan dicapai lima tahun mendatang yang merupakan turunan dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022,

Upaya terencana yang sistematis dan matang yang dikung oleh sumber daya manusia yang handal dan bermoral, sumber dana yang cukup, sarana dan prasarana penunjang operasional yang memadai serta budaya organisasi yang kondusif dengan komitmen bersama diyakini akan meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terus menerus, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Renstra DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DLH untuk menjalankan program kegiatan di DLH yang mengacu kepada Visi Misi Gubernur terpilih yaitu “***Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi***”.

Kondisi lingkungan yang terus mengalami degradasi, baik pencemaran udara, air, tanah lahan-lahan produktif maupun pola tingkah laku masyarakat yang belum peduli dengan keberlanjutan dan kelangsungan hidup lingkungan menuntut pelaksanaan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang optimal, penyelenggaraan pemerintahan, perlu diantisipasi. Selain itu keseriusan dalam melaksanakan tugas serta didukung dengan perencanaan yang matang dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sangat diperlukan.

Melalui perencanaan strategis yang telah disusun ini, diharapkan seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat bekerja dengan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan perannya sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan mempedomani rencana strategis tahun 2017 – 2022.

Demikian Rencana Strategis ini disusun dengan harapan akan menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan dan pelaksanaan tugas-tugas lingkungan hidup, dengan pengukuran kinerja setiap tahunnya melalui Rencana Kerja (Renja).

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran	1 Indeks Kualitas Air	Program Peningkatan Pengendalian dan penataan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan Konsentrasi BOD	6,57 mg/l	2% (6,44 mg/l)	840,341,000	2% (6,31 mg/l)	1,306,875,000	2% (6,18 mg/l)	1,157,277,000	2% (6,06 mg/l)	1,331,370,000	2% (5,94 mg/l)	1,529,110,000	2% (5,94 mg/l)	6,164,973,000	DLH	
				Persentase penurunan Konsentrasi COD	18,40 mg/l	2% (18,03 mg/l)		2% (17,67 mg/l)		2% (17,32 mg/l)		2% (16,97 mg/l)		2% (16,63 mg/l)		2% (16,63 mg/l)			
				Persentase penurunan Konsentrasi TSS	41,1 mg/l	2% (40,28 mg/l)		2% (39,47 mg/l)		2% (38,68 mg/l)		2% (37,91 mg/l)		2% (37,15 mg/l)		2% (37,15 mg/l)			2% (37,15 mg/l)
			1 Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Jumlah titik pantau Kualitas Air Sungai	99 Titik Pantau	99 Titik Pantau	390,341,000	99 Titik Pantau	448,895,000	99 Titik Pantau	516,225,000	99 Titik Pantau	593,660,000	99 Titik Pantau	682,710,000	99 Titik Pantau	2,631,831,000	DLH	Sungai Semenduk, Rangkui, Kurau, Selan, Kepoh, pala, Lenggang, Bangka Kota, Mancung/Jering, Batu Rusa, Budina
			2. Pengendalian Beban Pencemaran Air	2 Rekomendasi Pengendalian Beban Pencemaran Air	0	1 Rekomendasi	200,000,000	1 Rekomendasi	270,480,000	1 Rekomendasi	311,052,000	1 Rekomendasi	357,710,000	1 Rekomendasi	411,400,000	7 Rekomendasi	1,550,642,000	DLH	Sungai Rangkui
			3 Penetapan Daya Tampung beban pencemaran air	3 Peraturan Gubernur tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air	0	0	-	1 Dokumen	300,000,000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	300,000,000	DLH	Sungai Rangkui
			4 Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran dan Kerusakan air Sungai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 Dokumen Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran dan Kerusakan air Sungai	0	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	287,500,000	1 Dokumen	330,000,000	1 Dokumen	380,000,000	1 Dokumen	435,000,000	5 Dokumen	1,682,500,000	DLH	7 Kabupaten/Kota
			5 Rencana Aksi Daerah dalam Peningkatan kualitas sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5a Dokumen RAD Peningkatan Kualitas Sungai	0	0	-	1 Dokumen	150,000,000	0	172,500,000	0	198,375,000	0	228,131,250	1 Dokumen	749,006,250	DLH	7 Kabupaten/Kota
				5b Persentase Rekomendasi Rencana Aksi Yang ditindaklanjuti	0	0	-	100%		100%		100%		100%		DLH			
		2 Indeks Kualitas Udara	Program Peningkatan Pengendalian dan penataan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan Konsentrasi SO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	151,5 µg/Nm3	2% (148,47µg/Nm3)	250,000,000	2% (145,50 µg/Nm3)	287,500,000	2% (142,59 µg/Nm3)	330,625,000	2% (139,74 µg/Nm3)	380,218,750	2% (136,94 µg/Nm3)	437,251,563	10% (136,94 µg/Nm3)	1,685,595,313	DLH	
				Persentase penurunan Konsentrasi NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	222,24 µg/Nm3	2% (217,79 µg/Nm3)		2% (213,44 µg/Nm3)		2% (209,17 µg/Nm3)		2% (204,98 µg/Nm3)		2% (200,88 µg/Nm3)		10% (200,88 µg/Nm3)			
			1 Pemantauan kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Jumlah Titik pantau kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	21 Titk Pantau	21 Titik Pantau	250,000,000	21 Titik Pantau	287,500,000	21 Titik Pantau	330,625,000	21 Titik Pantau	380,218,750	21 Titik Pantau	437,251,563	21 Titik Pantau	1,685,595,313	DLH	7 Kabupaten/Kota
			2 Inventarisasi dan identifikasi sumber Sumber pencemaran Kualitas Udara Ambien Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Dokumen Inventarisasi dan identifikasi sumber Sumber pencemaran Kualitas Udara Ambien	0	0	-	1 Dokumen	150,000,000	2	300,000,000	2 Dokumen	345,000,000	2 Dokumen	350,000,000	7 Dokumen	1,145,000,000	DLH	7 Kabupaten/Kota
		3 Indeks Tutupan lahan	Program Peningkatan Pengendalian dan penataan Lingkungan Hidup	Persentase Luas Lahan Kritis yang terpulihkan		0	-	0	850,000,000	0	150,000,000	0	200,000,000	0	300,000,000		1,500,000,000	DLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun - 1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			1 Identifikasi dan Pemetaan Tutupan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pemetaan Tutupan Lahan	0	0	-	1 Dokumen	700,000,000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	700,000,000	DLH	7 Kabupaten/Kota	
			2 Rencana Aksi Daerah dalam Pemulihan Tutupan Lahan	- Dokumen RAD Pemulihan Tutupan Lahan	0	0	-	1 Dokumen	150,000,000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	150,000,000	DLH	7 Kabupaten/Kota	
				- Luas Lahan kritis terehabilitasi	0	0	-	0	-	10 Hektar	150,000,000	10 Hektar	200,000,000	10 Hektar	300,000,000	30 Hektar	650,000,000	DLH	7 Kabupaten Kota	
			Program Peningkatan Pengendalian dan penataan Lingkungan Hidup	1. Persentase a ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan lingkungan yang diawasi	58%	60.00%		500,000,000	62.00%	1,397,500,000	65.00%	1,606,875,000	67.00%	1,848,270,000	70.00%	2,125,657,750	100	DLH		
			1 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan	1 Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi	50 usaha/Kegiatan	70 Usaha/Kegiatan		400,000,000	80 Usaha/Kegiatan	517,500,000	95 Usaha/Kegiatan	595,125,000	90 Usaha/Kegiatan	684,395,000	100 Usaha/Kegiatan	787,000,000	100 Usaha/Kegiatan	2,984,020,000	DLH	7 Kabupaten Kota
			2 Pelaksanaan Penilaian Peringkat kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)	2 Jumlah Usaha/Kegiatan yang memperoleh rapot Biru	34 Usaha/Kegiatan	0	-	36 Usaha/Kegiatan	450,000,000	38 Usaha/Kegiatan	517,500,000	40 Usaha/Kegiatan	595,125,000	42 Usaha/Kegiatan	684,393,750	100 Usaha/Kegiatan	2,247,018,750	DLH	7 Kabupaten Kota	
			3 Pemantauan dan Pengawasan Penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO)	3 Jumlah Kegiatan yang diawasi	0	0	-	35 Kegiatan	150,000,000	35 Kegiatan	172,500,000	35 Kegiatan	198,375,000	35 Kegiatan	228,132,000	140 Kegiatan	749,007,000	DLH	7 Kabupaten Kota	
			4 Penaatan Sanksi Administrasi terhadap izin lingkungan dan/atau izin PPLH oleh usaha/kegiatan	2 Jumlah sanksi Administrasi yang ditindak lanjuti	0	0	-	100%	150,000,000	100%	172,500,000	100%	198,375,000	100%	228,132,000	100	749,007,000	DLH	7 Kabupaten Kota	
			5 Verifikasi permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi	4 Jumlah Rekomendasi yag dikeluarkan	0	0	-	1 Rekomendasi	15,000,000	1 Rekomendasi	17,000,000	1 Rekomendasi	20,000,000	1 Rekomendasi	23,000,000	4 Rekomendasi	75,000,000	DLH	7 Kabupaten Kota	
		Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Program Peningkatan Pengendalian dan penataan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup dengan Sanksi Administrasi	0	100%		100,000,000	100%	115,000,000	100%	132,250,000	100%	152,000,000	100%	175,000,000	100%	674,250,000	DLH	
			7 Penerimaan, penelaahan, dan verifikasi pengaduan masyarakat	7 Jumlah Pengaduan masyarakat yang diverifikasi		14 Kasus		100,000,000	14 Kasus	115,000,000	14 Kasus	132,250,000	14 Kasus	152,000,000	14 Kasus	175,000,000	674,250,000	DLH	7 Kabupaten Kota	
	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor	1 Pertumbuhan kebijakan lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor	Program Peningkatan tata Kelola Lingkungan Hidup	Pertumbuhan kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan	100%	100%		10,609,533,329	100%	14,042,149,209	100%	16,629,420,341	100%	21,144,901,742	100%	36,221,105,563	100%	98,647,110,184	DLH	
			1 Penyusunan KLHS RZWP3K	1 Jumlah Dokumen KLHS RZWP3K	0	1 Dokumen		300,000,000	0	-	0	-	0	-	0		300,000,000	DLH	OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2 Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	2 Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1 Dokumen	2 Dokumen	1,817,893,335	2 Dokumen	1,817,895,000	2 Dokumen	1,817,895,000	2 Dokumen	2,000,000,000.00	2 Dokumen	2,000,000,000.00	10 Dokumen	9,453,683,335	DLH	OPD Provinsi
			3 Validasi KLHS Kabupaten/Kota	3 Jumlah Dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang divalidasi	0	0	-	7 Dokumen	250,000,000	7 Dokumen	287,500,000	7 Dokumen	330,625,000.00	7 Dokumen	380,250,000.00	28 Dokumen	1,248,375,000	DLH	7 Kabupaten/Kota
			4 Penyusunan Dokumen Reviu KLHS	4 Jumlah Dokumen Reviu KLHS	0	0	-	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000.00	1 Dokumen	400,000,000.00	4 Dokumen	1,600,000,000	DLH	OPD Provinsi
			5 Penyusunan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	5 Jumlah Dokumen Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	0	1 Dokumen	434,825,000	1 Dokumen	150,000,000	0	-	0	-	0	-	2 Dokumen	584,825,000	DLH	OPD Provinsi
			6 Penyusunan Dokumen Reviu Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	6 Jumlah Dokumen Reviu Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	500,000,000.00	1 Dokumen	500,000,000	DLH	OPD Provinsi
			7 Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	7 Jumlah Dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	0	1 Dokumen	151,844,000	1	500,000,000	0	-	0	-	0	-	2 Dokumen	651,844,000	DLH	OPD Provinsi dan 7 Kupaten/Kota
			8 Penyusunan Dokumen Reviu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	8 Jumlah Dokumen Reviu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	0	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	174,620,600.00	1 Dokumen	500,000,000.00	2 Dokumen	674,620,600	DLH	OPD Provinsi dan 7 Kupaten/Kota
			9 Analisis data dan informasi Lingkungan Hidup	9 Jumlah Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	1 Dokumen	1 Dokumen	102,709,000	1 Dokumen	118,116,000	1 Dokumen	135,850,000	1 Dokumen	156,210,000.00	1 Dokumen	180,000,000.00	6 Dokumen	692,885,000	DLH	OPD Provinsi
		2 Pertumbuhan layanan kajian dampak lingkungan yg efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Program Peningkatan tata Kelola Lingkungan Hidup	Persentase Pertumbuhan Perusahaan yang memiliki kajian lingkungan	0	10%	228,011,000	18%	262,212,000	25%	301,545,000	31%	346,780,000	36%	365,450,000	36%	1,503,998,000	DLH	
			Layanan Penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang dilayani	17 Usaha/Kegiatan	6 Usaha/Kegiatan	127,540,000	8 Usaha/Kegiatan	140,300,000	10 Usaha/Kegiatan	161,345,000	12 Usaha/Kegiatan	185,550,000	14 Usaha/Kegiatan	180,000,000.00	50 Usaha/Kegiatan	794,735,000	DLH	7 Kabupaten/kKota
			Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	100,471,000	7 Rekomendasi	121,912,000	7 Rekomendasi	140,200,000	7 Rekomendasi	161,230,000	7 Rekomendasi	185,450,000	35 Rekomendasi	709,263,000	DLH	7 Kabupaten/Kota
			5 Penyediaan informasi AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan	Jumlah Informasi AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang dipublikasikan				1 Kali	150,000,000	1 Kali	175,000,000	1 Kali	200,000,000	1 Kali	220,000,000	1 Kali	745,000,000	DLH	OPD Provinsi
Meningkatkan Upaya penanganan sampah di TPA Regional	Meningkatnya penanganan sampah di Kawasan TPA Regional	Persentase peningkatan penanganan sampah	Program Peningkatan Pengolahan Sampah Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan	0	0%	665,000,000	0%	665,000,000	5%	2,000,000,000	10%	3,000,000,000	15%	4,500,000,000		10,830,000,000	DLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Studi Manajemen dan Produksi Persampahan	Jumlah Dokumen Studi Manajemen dan Produksi Persampahan	0	1 Dokumen	350,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	350,000,000	DLH	
			Penyusunan Kajian Dampak Lingkungan Kawasan TPA Regional	Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan Kawasan TPA Regional	0	1 Dokumen	665,000,000	1 Dokumen	665,000,000	0	-	0	-	0	-	2 Dokumen	1,330,000,000	DLH	
			Operasional TPA Regional	Volumen Sampah yang dikelola	0	0	-	0	-	54000 Ton	2,000,000,000	54000 Ton	3,000,000,000	54000 Ton	4,500,000,000	27000 Ton	9,500,000,000	DLH	
			Penyusunan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan TPA Regional	Dokumen Perjanjian Kerjasama	0	1 Dokumen	200,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	200,000,000	DLH	
			Penyusunan Naskah Akademik Raperda Persampahan	Dokumen Naskah Akademik Rperda Persampahan	0	0	-	1 Dokumen	100,000,000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	100,000,000	DLH	
	Meningkatnya upaya pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) melalui koordinasi lintas sektor	Penurunan emisi GRK dari sektor terkait,	Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor limbah terhadap baseline BAU	5.25%	6.47%	201,344,507	7.29%	231,600,000	7.84%	266,285,000	8.23%	306,231,250	8.51%	352,160,938	8.51%	1,357,621,695	DLH	
			Inventarisasi emisi gas rumah kaca	Dokumen Inventarisasi emisi gas rumah kaca	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	172,500,000	%	198,375,000	1 Dokumen	228,131,250	1 Dokumen	262,350,938		1,011,357,188	DLH	
			Implementasi upaya adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (ProKlim)	Jumlah Kampung Iklim	0	3 Kampung	51,344,507	4 Kampung	59,100,000	5 Kampung	67,910,000	6 Kampung	78,100,000	7 Kampung	89,810,000		346,264,507	DLH	
Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis peran serta masyarakat	Persentase kader /kelompok masyarakat yang Aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase Volume Sampah yang terolah berbasis peran serta masyarakat		10%	241,015,308	20%	644,820,000	30%	704,030,000	40%	771,875,000	50%	600,464,500	50%	2,962,204,808		
			Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kader/Kelompok Masyarakat yang Terlatih	20 Kelompok	35 Kelompok	125,925,308	40 Kelompok	144,820,000	45 Kelompok	166,530,000	50 Kelompok	191,250,000	55 Kelompok	220,245,000	55 Kelompok	848,770,308	DLH	
			Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	Jumlah Penghargaan Tingkat Provinsi	5 Sekolah	14 Penghargaan	74,390,000	14 Penghargaan	150,000,000	14 Penghargaan	172,500,000	14 Penghargaan	198,375,000	14 Penghargaan	228,132,000	70 Penghargaan	823,397,000	DLH	
			Pemantauan dan Evaluasi Program Adipura	Rata-rata Nilai Fisik Adipura meningkat setiap tahun	73.3	74	40,700,000	74	100,000,000	74	115,000,000	74	132,250,000	74	152,087,500		540,037,500	DLH	
			Penetapan pengakuan MHA, Kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	- Data inventarisasi dan verifikasi keberadaan MHA, kearifan lokal, dan pengetahuan tradisional	0	0	-	1 Dokumen	250,000,000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	250,000,000	DLH	
				- Data pemetaan wilayah adat dan hutan adat	0	0	-	0	-	1 Dokumen	250,000,000	0	-	0	-	1 Dokumen	250,000,000	DLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				- Peraturan daerah lintas kabupaten dalam satu provinsi MHA	0		-	0	-	0	-	1 Dokumen	250,000,000	0	-	1 Dokumen	250,000,000	DLH	
			Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pertumbuhan kebijakan Taman Kehati		0	-	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	4 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	250,000,000	7 Dokumen	1,750,000,000		
			Inventarisasi Keaneka Ragaman Hayati provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Inventarisasi Keaneka Ragaman Hayati Provinsi kepulauan Bangka Belitung		0	-	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	0	-		750,000,000		
			Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Konservasi keanekaragaman hayati di Provinsi Bangka Belitung	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati		0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	250,000,000	0	-		250,000,000		
			Penetapan Taman kehati yang terbentuk	Dokumen Penetapan Taman Kehati		0	-	0	-	0	-	2 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	250,000,000		750,000,000		
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Laboratorium lingkungan	1,000,000,000	0.50%	2,020,760,182	1%	2,323,874,209	1.15%	2,672,455,341	2.00%	3,073,323,642	2.50%	3,534,322,188	2.50%	13,624,735,562	DLH	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium	Jumlah sampel yang dilayani dalam 1 tahun		1100 Sampel	956,472,684	1225 Sampel	1,100,000,000	1350 Sampel	1,265,000,000	1475 Sampel	1,455,000,000	1600 Sampel	1,673,000,000	1600 Sampel	6,449,472,684	DLH	
			Sampling Parameter Kualitas Lingkungan	Jumlah Titik Sampling Parameter Kualitas Lingkungan		25 Titik Sampling	64,287,498	35 Titik Sampling	100,000,000	40 Titik Sampling	125,000,000	45 Titik Sampling	150,000,000	50 Titik Sampling	175,000,000	50 Titik Sampling	614,287,498	DLH	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium		2 Paket	1,000,000,000	2 Paket	1,000,000,000	2 Paket	1,000,000,000	2 Paket	1,000,000,000	2 Paket	3,000,000,000	10 Paket	7,000,000,000	DLH	
			Peningkatan Eksistensi Laboratorium	Jumlah promosi dan Publikasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun		0	-	1 Kali	65,000,000	1 Kali	70,000,000	1 Kali	75,000,000	1 Kali	80,000,000	4 Kali	290,000,000	DLH	
			Penyusunan Dokumen Lingkungan Laboratorium	Jumlah Dokumen UKL dan UPL Laboratorium		0	-	1 Dokumen	150,000,000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	150,000,000	DLH	
			Penyusunan DED dan FS UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dokumen DED dan FS UPTD Laboratorium Lingkungan		0	-	2 Dokumen	700,000,000	0	-	0	-	0	-	2 Dokumen	700,000,000	DLH	
			Penyusunan Dokumen Kajian Dampak Lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan	Dokumen Kajian Dampak Lingkungan		0	-	0	-	1 Dokumen	500,000,000	0	-	0	-	1 Dokumen	500,000,000	DLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pengadaan Gedung UPTD Laboratorium Lingkungan	Unit Gedung UPTD Laboratorium Lingkungan terbangun		0	-	0	-	0	-	0	-	1 Unit	10,000,000,000	1 Unit	10,000,000,000	DLH	
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	100%	100%	270,000,000	100%	505,000,000	100%	568,500,000	100%	640,175,000	100%	721,191,250	100%	2,704,866,250	DLH	
			Peningkatan Mutu dan Pengembangan Laboratorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Usulan Parameter Lingkungan untuk akreditasi	28 Parameter	30 Parameter	270,000,000	32 Parameter	310,000,000	34 Parameter	356,500,000	36 Parameter	409,975,000	38 Parameter	471,471,250	38 Parameter	1,817,946,250	DLH	
			Pembinaan laboratorium lingkungan Kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pengawasan lingkungan	Jumlah Laboratorium Lingkungan Kabupaten/kota yang dibina	5 Laboratorium	0	-	5 Laboratorium	75,000,000	5 Laboratorium	80,000,000	4 Laboratorium	85,000,000	4 Laboratorium	90,000,000	4 Laboratorium	330,000,000	DLH	
			Peningkatan Kapasitas SDM UPTD Laboratorium Lingkungan	Jumlah SDM yang terlatih	40 SDM	0	-	40 SDM	120,000,000	40 SDM	132,000,000	40 SDM	145,200,000	40 SDM	159,720,000	40 SDM	556,920,000	DLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

4,903,7504,903,7501,634,583 #####

6123208

=8.01700,536

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun - 1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1 Meningkatkan Penyelenggaraan prinsip pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri melalui kajian lingkungan hidup Strategis	1 Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, peternakan dan Kehutanan	1 Jumlah dokumen KLHS yang teritegrasi dalam Perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sub sektor pertanian, peternakan dan Kehutanan	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan		0	0	1 Dokumen	500,000,000	0	0	0	0	0	0	Ada (1 Dokumen)	500,000,000	DLH	
			Penyusunan Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu	Jumlah Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu		0	-	1 Dokumen	500,000,000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	500,000,000	DLH	
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		0	0	1 Dokumen	650,000,000	0	0	0	0	0	0	Ada (1 Dokumen)	650,000,000	DLH	
			Penyusunan Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		0	-	1 Dokumen	650,000,000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	650,000,000	DLH	
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok		0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	0	-	0	-	0	-	Ada (1 Dokumen)	1,000,000,000	DLH	
	Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sub sektor perikanan	Jumlah dokumen KLHS yang teritegrasi dalam Perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sub sektor perikanan	Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok	Jumlah Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok		0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	DLH	
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang digunakan dalam perencanaan kawasan		-	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	-	-	-	-	Ada (1 Dokumen)	1,000,000,000	DLH	
			Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik	Jumlah Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang tersusun		0	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	0	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	DLH	
	Meningkatkan pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sektor pariwisata	Jumlah dokumen KLHS yang teritegrasi dalam Perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sektor pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi ASDP - Manggar yang digunakan dalam perencanaan Kawasan		0	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	0	-	0	-	Ada (1 Dokumen)	1,000,000,000	DLH	
			Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi ASDP - Manggar	Jumlah Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi ASDP - Manggar yang tersusun		0	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	0	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	DLH	
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang yang digunakan dalam perencanaan kawasan		0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	850,000,000	0	-	Ada (1 Dokumen)	850,000,000	DLH	
			Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang	Jumlah Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang yang tersusun		0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	850,000,000	0	-	1 Dokumen	850,000,000	DLH	
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok yang digunakan dalam perencanaan kawasan		0	-	0	-	1 Dokumen	800,000,000	0	-	0	-	Ada (1 Dokumen)	800,000,000	DLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun - 1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok	Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok yang tersusun		0	-	0	-	1 Dokumen	800,000,000	0	-	0	-	1 Dokumen	800,000,000	DLH	
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba yang digunakan dalam perencanaan kawasan		0	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	0	-	0	-	Ada (1 Dokumen)	1,000,000,000	DLH	
			Penyusunan Dokumen KLHS di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	Jumlah Dokumen KLHS di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba yang tersusun		0	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	0	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	DLH	
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan		0	-	0	-	1 Dokumen	850,000,000	0	-	0	-	Ada (1 Dokumen)	850,000,000	DLH	
			Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung		0	-	0	-	1 Dokumen	850,000,000	0	-	0	-	1 Dokumen	850,000,000	DLH	
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang digunakan dalam perencanaan kawasan		0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	Ada (1 Dokumen)	1,000,000,000	DLH	
			Penyusunan Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Jumlah Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang tersusun		0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	DLH	
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera		0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	Ada (1 Dokumen)	1,000,000,000	DLH	
			Penyusunan Dokumen KLHS kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Jumlah Dokumen KLHS kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera yang tersusun		0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	DLH	
	Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dim perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sektor industri	Jumlah dokumen KLHS yang teritegrasi dalam Perencanaan pembangunan berkelanjutan pada sektor industri	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Air Kelik yang digunakan untuk perencanaan kawasan		0	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	0	-	0	-	Ada (1 Dokumen)	1,000,000,000	DLH	
			Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Air Kelik	Jumlah Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Air Kelik yang tersusun		0	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	0	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	DLH	
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang digunakan dalam perencanaan kawasan		0	-	1 Dokumen	900,000,000	0	-	0	-	0	-	Ada (1 Dokumen)	900,000,000	DLH	
			Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat	Jumlah Dokumen KLHS Kawasan Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang tersusun		0	-	1 Dokumen	900,000,000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	900,000,000	DLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun - 1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai yang digunakan untuk perencanaan kawasan		0	-	1 Dokumen	900,000,000	0	-	0	-	0	-	Ada (1 Dokumen)	900,000,000	DLH	
			Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai	Jumlah Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai yang tersusun		0	-	1 Dokumen	900,000,000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	900,000,000	DLH	
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat yang digunakan untuk perencanaan kawasan		0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	0	-	0	-	0	-	Ada (1 Dokumen)	1,000,000,000	DLH	
			Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat	Jumlah Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat yang tersusun		0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	1,000,000,000	DLH	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Laboratorium Lingkungan terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Laboratorium Lingkungan terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Pertumbuhan Pendapatan asli daerah dari Laboratorium lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi untuk menunjang peningkatan PAD dari Laboratorium Lingkungan		0.05%	2,290,760,182	1%	2,945,000,000	1.15%	3,098,500,000	2%	3,435,175,000	2.50%	5,809,191,250	2.50%	17,578,626,432	DLH	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium	Jumlah sampel yang dilayani dalam 1 tahun		1100 Sampel	956,472,684	1225 Sampel	1,100,000,000	1350 Sampel	1,265,000,000	1475 Sampel	1,455,000,000	1600 Sampel	1,673,000,000	1600 Sampel	6,449,472,684	DLH	
				Jumlah promosi dan Publikasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun		0	-	1 Kali	65,000,000	1 Kali	70,000,000	1 Kali	75,000,000	1 Kali	80,000,000	4 Kali	290,000,000	DLH	
			Peningkatan Mutu dan Pengembangan Laboatorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Usulan Parameter Lingkungan untuk akreditasi		30 Parameter Usulan	270,000,000	32 Parameter Usulan	310,000,000	34 Parameter Usulan	356,500,000	35 Parameter Usulan	409,975,000	37 Parameter Usulan	471,471,250	37 Parameter Usulan	1,817,946,250	DLH	
				Jumlah Dokumen Lingkungan bagi Laboratorium lingkungan yang tersusun		0	-	1 Dokumen	150,000,000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	150,000,000	DLH	
			Pembinaan laboratorium lingkungan Kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pengawasan lingkungan	Jumlah Laboratorium Lingkungan Kabupaten/kota yang dibina		0	-	5 Laboratorium	100,000,000	5 Laboratorium	150,000,000	5 Laboratorium	200,000,000	5 Laboratorium	250,000,000	5 Laboratorium	700,000,000	DLH	
			Peningkatan Kapasitas SDM UPTD Laboratorium Lingkungan	Jumlah SDM yang terlatih		0	-	40 SDM	120,000,000	40 SDM	132,000,000	40 SDM	145,200,000	40 SDM	159,720,000	40 SDM	556,920,000	DLH	
			Layanan Sampling Parameter Kualitas Lingkungan bagi sektor usaha	Jumlah Titik Sampling Parameter Kualitas Lingkungan yag dilayani		25 Titik Sampling	64,287,498	35 Titik Sampling	100,000,000	40 Titik Sampling	125,000,000	45 Titik Sampling	150,000,000	50 Titik Sampling	175,000,000	195 Titik Sampling	614,287,498	DLH	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium		1 Paket	1,000,000,000	2 Paket	1,000,000,000	2 Paket	1,000,000,000	2 Paket	1,000,000,000	2 Paket	3,000,000,000	9 Paket	7,000,000,000	DLH	
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara	Terjaganya Kualitas air di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Baku mutu	Persentase Peningkatan Titik Pantau badan air yang memenuhi baku mutu	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	Rata-rata Penurunan konsentrasi BOD, COD dan TSS di masing-masing titik pantau	N/A	1.0%	255,900,000	1.5%	980,000,000	2.0%	1,030,000,000	2.5%	330,000,000	3.0%	380,000,000	3%	2,975,900,000	DLH	
			Identifikasi Kualitas Air Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Beitung	Jumlah titik pantau Kualitas Air Sungai yang teridentifikasi		21 Titik Pantau	130,900,000	81 Titik Pantau	200,000,000	81 Titik Pantau	250,000,000	81 Titik Pantau	300,000,000	81 Titik Pantau	350,000,000	81 Titik Pantau	1,230,900,000	DLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun - 1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Pengendalian Beban Pencemaran Air	Rekomendasi pengendalian Beban pencemaran air		8 Rekomendasi	125,000,000	8 Rekomendasi	30,000,000	8 Rekomendasi	30,000,000	8 Rekomendasi	30,000,000	8 Rekomendasi	30,000,000	40 Rekomendasi	245,000,000	DLH	
				Dokumen Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran dan Kerusakan air Sungai		0	-	1 Dokumen	750,000,000	0	-	0	-	0	-		750,000,000	DLH	
				Dokumen Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai yang terhitung		0	-	0	-	1 Dokumen	750,000,000						750,000,000	DLH	
			Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah dalam Peningkatan kualitas sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Dokumen Rencana Aksi Daerah dalam Peningkatan Kualitas Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		0	-	0	-	2 Dokumen	330,000,000	2 Dokumen	380,000,000	3 Dokumen	435,000,000		1,145,000,000	DLH	
				- Persentase rekomendasi Peningkatan Kualitas Sungai yang ditindak lanjuti		0	-	0	-	0	-	50%	100,000,000	50%	125,000,000		225,000,000	DLH	
	Meningkatkan Kualitas Air melalui keterlibatan peran serta masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran air	PROGRAM PENINGKATAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN SAMPAH, DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan Kelikutsertaan Masyarakat dalam Pengendalian pencemaran air	N/A	0	-	0	-	5%	-	10%	-	15%	-	15%	-	DLH	
			Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	- Pencanangan Prokasih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		0	-	0	-	1 Kali	500,000,000	0	275,000,000	0	300,000,000	0	1,075,000,000	DLH	
				- Jumlah kelompok masyarakat dalam program Prokasih		0	-	0	-	50 Kelompok		50 Kelompok		50 Kelompok		50 Kelompok	-	DLH	
				- Jumlah Kelompok masyarakat pengelola IPAL domestik (Komunal)					200,000,000	4 Kelompok	250,000,000	5 Kelompok	300,000,000	6 Kelompok	350,000,000	6 Kelompok	1,100,000,000	DLH	
	Penetapan Regulasi terkait Peningkatan kualitas air	Peningkatan instrumen dan Regulasi pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Peraturan daerah terkait Peningkatan kualitas air yang diimplementasikan	N/A	0	-	0	-	0	-	1 Peraturan Daerah	200,000,000	0	-	1 Peraturan Daerah	200,000,000	DLH	
			Penyusunan dan Penetapan Kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air	N/A	0	-	0	0	0	-	2 Dokumen	200,000,000	0	-	2 Dokumen	200,000,000	DLH	
	Terjaganya Kualitas Udara dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Titik Pantau udara yang memenuhi baku mutu	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas		2%	250,000,000	2%	287,500,000	2%	830,625,000	2%	380,218,750	2%	437,251,563	2%	2,185,595,313	DLH	
			Identifikasi kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Jumlah Titik pantau kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	21 Titik Pantau	21 Titik Pantau	250,000,000	21 Titik Pantau	287,500,000	21 Titik Pantau	330,625,000	21 Titik Pantau	380,218,750	21 Titik Pantau	437,251,563	21 Titik Pantau	1,685,595,313	DLH	
				- Rekomendasi yang diberikan terkait hasil identifikasi kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	N/A	7 Rekomendasi		7 Rekomendasi		7 Rekomendasi		7 Rekomendasi		7 Rekomendasi		21 Rekomendasi	-	DLH	
				- Dokumen Inventarisasi dan identifikasi sumber Sumber pencemaran Kualitas Udara Ambien	N/A	0	-	0	-	0	500,000,000	2 Dokumen	-	0	-		500,000,000	DLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun - 1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati	Persentase peningkatan Luas lahan kritis yang terehabilitasi dan terevegetasi di luar kawasan hutan	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas lahan kritis yang terehabilitasi dan terevegetasi di luar kawasan hutan	N/A		-	10 Ha	450,000,000	15 Ha	460,000,000	15 Ha	480,000,000	15 Ha	500,000,000	55 hektar	1,890,000,000	DLH
			Fasilitasi peningkatan Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luas Lahan kritis diluar kawasan hutan yang terehabilitasi melalui kemitraan dengan sektor swasta	N/A	0	-	5 Ha	150,000,000	10 Ha	150,000,000	10 Ha	160,000,000	10 Ha	170,000,000	30 Hektar	630,000,000	DLH
				Luas Ruang Terbuka Hijau yang terbangun	N/A	0	-	5 - 10%	150,000,000	5 - 10%	160,000,000	5 - 10%	170,000,000	5 - 10%	180,000,000	5 - 10%	660,000,000	DLH
			Peningkatan fungsi ekosistem mangrove di wilayah pesisir dan laut	Luas Rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir dan laut	N/A	0	-	2 Ha	150,000,000	2 Ha	150,000,000	2 Ha	150,000,000	2 Ha	150,000,000	8 Ha	600,000,000	DLH
			PROGRAM PENINGKATAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN SAMPAH, DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan Keikutsertaan Masyarakat dalam konservasi sumber daya alam	N/A		-	50%	300,000,000	60%	650,000,000	70%	825,000,000	80%	350,000,000	80%	2,125,000,000	DLH
			Pemberdayaan masyarakat hukum adat kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal	N/A	0	-	2 Dokumen	300,000,000	0	-	0	-	0	-	2 Dokumen	300,000,000	DLH
				Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	N/A	0	-	0	-	30 Kelompok	300,000,000	36 Kelompok	325,000,000	42 Kelompok	350,000,000	42 Kelompok	975,000,000	DLH
			Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati	Jumlah Dokumen hasil penyusunan Rencana Induk Pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati	N/A	0	-	0	-	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	250,000,000	0	-	1 Dokumen	600,000,000	DLH
				Tersusunnya Profil Taman Keaneka ragaman hayati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Profil Kehati Kabupaten Bangka Tengah	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	250,000,000	0	-	1 Dokumen	250,000,000	DLH
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Peraturan daerah terkait Penetapan Taman kehati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		0	-	0	-	0	-	2 Dokumen	180,000,000	0	-	2 Dokumen	180,000,000	DLH
			Penyusunan dan Penetapan Kebijakan bidang lingkungan hidup	Perda Penetapan Taman Keanekaragaman hayati di Provinis Kepulauan Bangka Belitung		0	-	0	-	0	-	2 Dokumen	180,000,000	0	-	2 Dokumen	180,000,000	DLH
Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang yang diawasi tergolong taat	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan sanksi administrasi yang dikeluarkan	36%	35%	500,000,000	30%	947,500,000	27%	1,089,375,000	25%	1,253,145,000	22%	1,441,264,000	22%	5,231,284,000	DLH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun - 1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi		50 Usaha/Kegiatan	400,000,000	80 Usaha/Kegiatan	517,500,000	95 Usaha/Kegiatan	595,125,000	90 Usaha/Kegiatan	684,395,000	100 Usaha/Kegiatan	787,000,000	100 Usaha/Kegiatan	2,984,020,000	DLH
			Pemantauan dan Pengawasan Penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO)	Jumlah usaha/Kegiatan Penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO) yang diawasi		0	-	35 Kegiatan	150,000,000	35 Kegiatan	172,500,000	35 Kegiatan	198,375,000	35 Kegiatan	228,132,000	35 Kegiatan	749,007,000	DLH
			Penaatan Sanksi Administrasi terhadap izin lingkungan dan/atau izin PPLH oleh usaha/kegiatan	Persentase sanksi Administrasi yang ditindak lanjuti		0	-	100%	150,000,000	100%	172,500,000	100%	198,375,000	100%	228,132,000	100%	749,007,000	DLH
			Verifikasi permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpul Limbah B3 Skala Provinsi yang dikeluarkan		0	-	1 Rekomendasi	15,000,000	1 Rekomendasi	17,000,000	1 Rekomendasi	20,000,000	1 Rekomendasi	23,000,000	4 Rekomendasi	75,000,000	DLH
			Penerimaan, penelaahan, dan verifikasi pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan masyarakat yang diverifikasi		14 Kasus	100,000,000	14 Kasus	115,000,000	14 Kasus	132,250,000	14 Kasus	152,000,000	14 Kasus	175,000,000	70 Kasus	674,250,000	DLH
	Meningkatkan Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN SAMPAH, DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah kader/kelompok masyarakat yang menerima penghargaan dalam perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup		5%	451,295,000	10%	622,495,500	15%	700,145,050	20%	787,933,555	25%	887,158,911	25%	3,449,028,016	DLH
			Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup	Jumlah Kader/Kelompok Masyarakat yang terlatih		33 Kelompok	284,905,000	40 Kelompok	313,395,500	45 Kelompok	344,735,050	50 Kelompok	379,208,555	55 Kelompok	417,129,411	55 Kelompok	1,739,373,516	DLH
			Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan yang diberikan		14 Penghargaan	81,390,000	14 Penghargaan	150,000,000	14 Penghargaan	172,500,000	14 Penghargaan	198,375,000	14 Penghargaan	228,132,000	70 Penghargaan	830,397,000	DLH
			Implementasi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim (Proklam)	Jumlah Kampung Iklim		3 Kampung	50,000,000	4 Kampung	59,100,000	5 Kampung	67,910,000	6 Kampung	78,100,000	7 Kampung	89,810,000	7 Kampung	344,920,000	DLH
			Pemantauan dan Evaluasi Program Adipura	Rata-rata nilai fisik adipura yang memenuhi standar		74	35,000,000	74	100,000,000	74	115,000,000	74	132,250,000	74	152,087,500	74	534,337,500	DLH
Meningkatkan Penyelenggaraan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui Rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta kajian lingkungan hidup Strategis	Meningkatnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi dlm perencanaan pembangunan serta Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap	Jumlah dokumen RPPLH dan KLHS yang teritegrasi dalam Perencanaan pembangunan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen RPPLH dan Dokumen KLHS wajib	2 Dokumen	2 Dokumen	689,378,000	1 Dokumen	1,768,116,000	1 Dokumen	135,850,000	1 Dokumen	656,210,000	1 Dokumen	1,680,000,000	5 Dokumen	4,929,554,000	DLH
			Penyusunan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)		1 Dokumen	434,825,000	1 Dokumen	150,000,000	0	-	0	-	0	-		584,825,000	DLH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun - 1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyusunan Dokumen Reviu Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Reviu Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)		0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	500,000,000		500,000,000	DLH
			Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		1 Dokumen	151,844,000	1	1,500,000,000	0	-	0	-	0	-		1,651,844,000	DLH
			Penyusunan Dokumen Reviu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Reviu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	2 dokumen	1,500,000,000	DLH
			Analisis data dan informasi Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)		1 Dokumen	102,709,000	1 Dokumen	118,116,000	1 Dokumen	135,850,000	1 Dokumen	156,210,000	1 Dokumen	180,000,000	5 Dokumen	692,885,000	DLH
	Meningkatnya sistem kajian dampak lingkungan yg efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Persentase Pertumbuhan Usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yg efektif bagi usaha dan kegiatan	N.A	6 Kali Penyelenggaraa n	228,011,000.00	8 Kali Penyelenggaraa n	412,212,000.00	10 Kali Penyelenggaraan	476,545,000.00	12 Kali Penyelenggaraan	546,780,000.00	14 Kali Penyelenggaraan	585,450,000.00	50 Kali Penyelenggaran	2,248,998,000	DLH
			Layanan Penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang dilayani		6 Usaha/Kegiat a n	127,540,000	8 Usaha/Kegiat a n	140,300,000	10 Usaha/Kegiatan	161,345,000	12 Usaha/Kegiatan	185,550,000	14 Usaha/Kegiatan	180,000,000	14 Usaha/Kegiat an	794,735,000	DLH
			Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi		7 Rekomendasi	100,471,000	7 Rekomendasi	121,912,000	7 Rekomendasi	140,200,000	7 Rekomendasi	161,230,000	7 Rekomendasi	185,450,000	35 Rekomendasi	709,263,000	DLH
			Penyediaan informasi AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan	Jumlah Informasi AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang dipublikasikan				1 Kali	150,000,000	1 Kali	175,000,000	1 Kali	200,000,000	1 Kali	220,000,000	4 Kali	745,000,000	DLH
Meningkatkan pengelolaan Sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dari sektor limbah	Meningkatnya pengelolaan dan penanganan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Sampah di TPA Sampah Regional	PROGRAM PENINGKATAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN SAMPAH, DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Layanan Persampahan skala regional	N.A	0%	0	0%	0	5%	0	10%	0	15%	0	15%	-	DLH
			Studi Manajemen dan Produksi Persampahan	Jumlah Dokumen Studi Manajemen dan Produksi Persampahan		1 Dokumen	350,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-		350,000,000	DLH
			Persiapan rencana Pra Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Terpadu Regional	Jumlah Laporan Rencana Pra Pembangunan Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Terpadu Regional		2 Laporan	250,000,000	2 Dokumen	450,000,000	1 Dokumen	700,000,000						1,400,000,000	DLH
			Operasional TPA Regional	Volumen Sampah yang dikelola		0	-	0	-	54000 Ton	2,000,000,000	54000 Ton	3,000,000,000	54000 Ton	4,500,000,000		9,500,000,000	DLH
			Inventarisasi emisi gas rumah kaca	Dokumen hasil Inventarisasi emisi gas rumah kaca		1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	175,000,000	5 Dokumen	595,000,000	DLH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun - 1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target			
1	2	3	5	6	7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	Target 16	Rp 17	Target 18	Rp 19	20	
			PROGRAM PENINGKATAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN SAMPAH, DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		0	-	5%	0	10%	0	15%	0	20%	0		-	DLH	
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui kemitraan bersama PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah role model Desa/Kelurahan dalam pengelolaan persampahan		0	-	7 Desa/Kelurahan	200,000,000	7 Desa/Kelurahan	250,000,000	7 Desa/Kelurahan	275,000,000	7 Desa/Kelurahan	300,000,000	35 Desa/Kelurahan	1,025,000,000	DLH	
				Jumlah Bank Sampah yang dibina		0	-	14 Bank Sampah	500,000,000	14 Bank Sampah	550,000,000	14 Bank Sampah	575,000,000	14 Bank Sampah	600,000,000	98 Bank Sampah	2,225,000,000	DLH	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Peraturan daerah terkait pengelolaan sampah yang diimplementasikan		0	-	1 Perda	-	0	-	0	-	0	-	1 Perda			
			Penyusunan dan Penetapan Kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah Dokumen terkait Penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		0	-	2 Dokumen	150,000,000	0	-	0	-	0	-		150,000,000	DLH	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	- Persentase Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap Layanan Sekretariat		100%	2,668,780,000	100%	11,246,940,000	100%	4,484,787,000	100%	5,248,726,350	100%	14,041,950,168	100%	37,691,183,518	DLH	
			- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan		95 Orang	1,647,680,000	95 Orang	1,810,000,000	95 Orang	1,991,000,000	95 Orang	2,190,000,000	95 Orang	2,409,000,000	95 Orang	10,047,680,000	DLH	
			- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan		95 Orang	770,000,000	95 Orang	9,000,000,000	95 Orang	2,000,000,000	95 Orang	2,500,000,000	95 Orang	11,000,000,000	95 Orang	25,270,000,000	DLH	
			- Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya		98	82,800,000	98	86,940,000	98	91,287,000	98	95,851,350	98	100,643,918	98	457,522,268	DLH	
			- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya		15	168,300,000	30	350,000,000	35	402,500,000	40	462,875,000	45	532,306,250	165	1,915,981,250	DLH	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	- Predikat Nilai Sakip Meningkat	B	B	345,000,000	B	379,500,000	B	417,450,000	B	459,195,000	B	505,114,500	B	2,106,259,500	DLH	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Daerah diatas 85%	3	3 Dokumen	300,000,000	4 Dokumen	165,000,000	4 Dokumen	181,500,000	4 Dokumen	199,650,000	4 Dokumen	219,615,000	19 Dokumen	1,065,765,000	DLH	
				Jumlah Dokumen Perencanaan yang responsive gender		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen			
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	4	4	45,000,000	4	49,500,000	4	54,450,000	4	59,895,000	4	65,884,500	20	274,729,500	DLH	
			Penyusunan Dokumen Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	N/A	1	-	1	165,000,000	1	181,500,000	1	199,650,000	1	219,615,000	5	765,765,000	DLH	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

